



**LAPORAN AKTUALISASI
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Angkatan IV Tahun 2019**

**Penyusunan Transkrip dengan Menggunakan
Template Combo Box**

Disusun oleh:

NAMA : MICHEL IKE PERMATASARI

NDH 5

NIP : 19951127 201903 2002

INSTANSI : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA
2019**



LEMBAR PENGESAHAN

Penyusunan Transkrip dengan Menggunakan Template Combo Box

Disusun Oleh:

Nama : MICHEL IKE PERMATASARI
NIP : 19951127 201903 2002
NDH 5
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Peserta Diklat,

Michel Ike Permatasari, A. Md. Sek.
NIP.199511272019032002

Menyetujui,

Mentor,

Dra. Tri Budi Utami, M.Si.
NIP. 196105201988032001

Coach,

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.
NIP. 196804011998032003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyusun sebuah Laporan Aktualisasi yang berjudul "Penyusunan Transkrip dengan Menggunakan Template Combo Box". Penyusunan aktualisasi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H, M.M selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
2. M. Dimyati Sudja, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Biro Persidangan 1 yang selalu mengingatkan untuk selalu ikhlas dalam bekerja.
3. Muhammad Yus Iqbal, S.E., selaku Kepala Bagian Risalah yang selalu memberikan doa dan dukungan penuh selama proses aktualisasi.
4. Dra. Tri Budi Utami, M.Si., selaku mentor yang selalu memberikan bimbingan, doa, dan semangat serta selalu memantau perkembangan selama proses aktualisasi
5. Sulasi Rongiyati, S.H., M.H., selaku *coach* yang selalu memberikan masukan dan dukungan selama ini
6. Rusmanto, SH., M.H., selaku penguji yang bertugas menguji pelaksanaan aktualisasi
7. Seluruh rekan kerja Bagian Risalah Setjen dan BK DPR RI
8. Kepada Ibu dan Bapak tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk penulis
9. Kepada seluruh rekan seperjuangan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Tahun 2019.

Laporan Aktualisasi ini akan menyajikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh penulis sebagai Calon Asisten Perisalah Legislatif Terampil di Bagian Risalah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam mengaktualisasikan tugas dan fungsi sebagai asisten perisalah legislatif.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam laporan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua kedepannya.

Jakarta, 16 Oktober 2019

Michel Ike Permatasari, A.Md. Sek.
NIP. 19951127 201903 2002

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
II. PROFIL ORGANISASI	
A. Deskripsi Organisasi.....	4
a. Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI	4
b. Biro Persidangan I.....	5
c. Bagian Risalah.....	6
d. Struktur Organisasi.....	8
B. Kondisi Saat Ini.....	9
C. Kondisi Yang Diharapkan.....	9
D. Identifikasi Isu.....	10
E. Teknik USG.....	10
F. Gagasan Pemecahan Isu.....	12
G. Tujuan.....	15
H. Manfaat.....	15
III. PELAKSANAAN AKTUALISASI	
A. Rancangan Aktualisasi.....	16
B. Deskripsi Kegiatan	23

C. Timetable Kegiatan.....	46
D. Stakeholder.....	46
E. Kendala.....	47
IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48
V. LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk didalamnya mengatur tentang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Berkaitan dengan pengaturan tentang CPNS Pasal 64 ayat (1) mengatur tentang masa percobaan CPNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun untuk memenuhi salah satu persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dengan demikian setelah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dan telah dinyatakan lulus sebagai CPNS dan kemudian diangkat menjadi PNS diharapkan PNS dimaksud dapat melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan sebagainya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Selama masa percobaan sebagai CPNS diatur juga tentang persyaratan untuk mengikuti Pelatihan Dasar CPNS dalam pelatihan dasar CPNS ini akan dilakukan *pengembangan* pembekalan kepada CPNS sehingga diharapkan akan tercipta bibit PNS yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) dimaksudkan juga untuk menanamkan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi (ANEKA). Selain itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak terlebih kepada pihak yang diwajibkan memberikan pendidikan dan

pelatihan terhadap CPNS, agar para peserta Latsar CPNS mampu mengerti dan memahami nilai-nilai dasar dalam aktualisasi setiap kegiatan.

Perlunya aktualisasi ini, maka Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki kebijakan baru yang didasari UU Nomor 5 Tahun 2014 yaitu Perka LAN Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III. Harapannya setelah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dimaksud CPNS akan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA pada setiap kegiatan dalam tugas jabatannya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Repbulik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif.

BAB II **PROFIL ORGANISASI**

A. Deskripsi Organisasi

a. Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sesuai dengan Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib pada Pasal 294 antara lain menyatakan bahwa "untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan maka dibentuk Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Selanjutnya bersadarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Perpres Nomor 27 Tahun 2015 tentang Setjen dan BK DPR RI) dinyatakan bahwa Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian.

Sesuai dengan Rencana Stategis Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016-2019, DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang administrasi dan persidangan. Di dalam melaksanakan tugasnya, Setjen DPR RI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal;
2. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;

3. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
6. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
7. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Visi dari Sekretariat Jenderal DPR RI adalah terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.

Misi dari Sekretariat Jenderal DPR RI adalah pertama, meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel. Kedua, memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

b. Biro Persidangan I

Biro Persidangan I merupakan salah satu Biro yang berada dibawah Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI. Biro Persidangan I memiliki visi yaitu terwujudnya dukungan

persidangan Komisi dan Persidangan Paripurna yang profesional dan akuntabel.

Misi dari Biro Persidangan I adalah mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan Fungsi DPR RI di Bidang Legislasi, Bidang Anggaran dan Bidang Pengawasan, mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan Persidangan Paripurna, mewujudkan kebijakan penyelenggaraan dukungan persidangan di Komisi dan Persidangan Paripurna.

Sedangkan tujuan dari Biro Persidangan I adalah meningkatkan dukungan rapat dan tata usaha pelaksanaan Fungsi DPR RI di Bidang Legislasi, Bidang Anggaran, dan Bidang Pengawasan, meningkatkan dukungan rapat dan tata usaha pelaksanaan Persidangan Paripurna, meningkatkan kebijakan penyelenggaraan persidangan di Komisi dan Persidangan Paripurna.

Biro Persidangan I juga membawahi Bagian Risalah dimana output dari Bagian Risalah adalah risalah rapat yang dijalankan oleh DPR RI.

c. Bagian Risalah

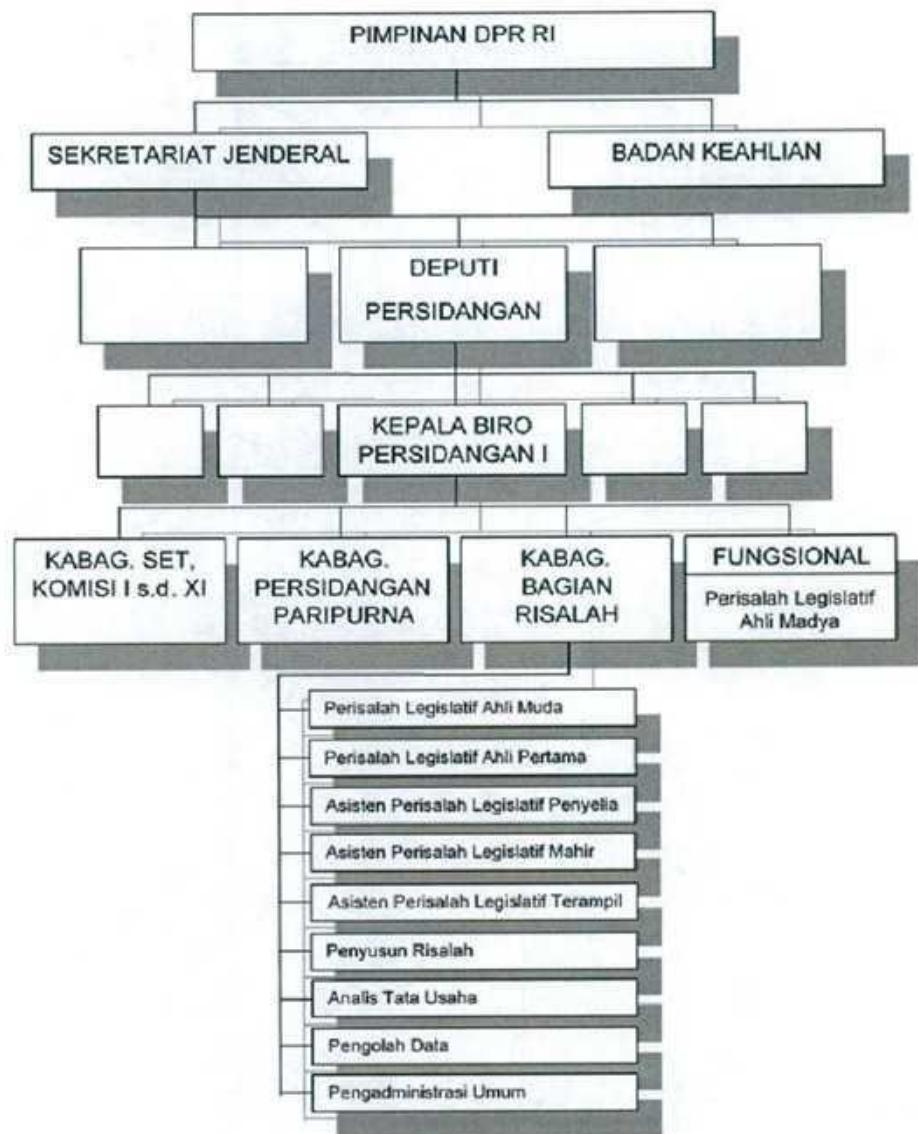
Unit kerja penulis berada di Bagian Risalah dimana Bagian Risalah ini merupakan salah satu unit kerja di bawah Biro Persidangan I.

I. Dasar Hukum yang menaungi bagian risalah:

- a. Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negera Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif;
- b. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif;
- c. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional;

- d. Peraturan Sekertaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Repbulik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif.

d. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Persidangan I

Bagan diatas merupakan skema dari struktur organisasi yang menaungi Bagian Risalah. Pimpinan DPR RI membawahi Sekretariat Jenderal DPR RI. Di bawah Sekretariat Jenderal terdapat Deputi Bidang Persidangan. Kemudian, Deputi Bidang Persidangan membawahi Kepala Biro Persidangan I yang mana di Biro Persidangan I terdapat beberapa bagian dan salah satunya adalah Bagian Risalah.

B. Kondisi Saat Ini

Pada awal pengerajan transkrip asisten perisalah legislatif membutuhkan waktu khusus untuk mengatur format penulisan dan penulisan nama pembicara, sehingga mengurangi waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk mentranskrip. Kondisi saat ini menunjukkan berbagai macam kendala seperti:

- a. Belum adanya format baku untuk pengerajan transkrip yang menyebabkan kurang optimalnya penyusunan transkrip.
- b. Penulisan nama pembicara pada label kaset dari komisi kurang jelas
- c. Tidak ada bahan untuk memvalidasi rekaman rapat yang kurang jelas,
- d. Pencarian nama hanya bisa dilakukan melalui pencarian di web DPR (on internet) sehingga ketika internet sedang off akan sulit untuk mengetahui nama pembicara
- e. Kesulitan mencari nama anggota dewan periode lalu, karena dalam portal hanya ada nama anggota periode terbaru, padahal masih dibutuhkan database periode yang lalu.

Maka dari itu, sebagai Asisten Perisalah Legislatif bertugas mencari inisiatif-inisiatif baru untuk mengkolaborasikan database dan dokumen transkrip menjadi satu kesatuan untuk mempercepat pengerajan transkripsi salah satunya dengan penyusunan template Combo Box.

C. Kondisi yang diharapkan

Kondisi yang diharapkan dari dibuatnya *template* transkrip dengan fitur combo box adalah agar transkrip rapat dapat segera diselesaikan dengan

waktu lebih cepat, validasi nama minim kesalahan, fitur bersifat fleksibel (database bisa diubah), setiap user bisa menambahkan data, dan template ini sifatnya *user friendly* sehingga proses pembuatan risalah sementara dapat segera dilakukan.

D. Identifikasi Isu

1. Belum dimanfaatkannya template combo box dalam penyusunan transkrip.
2. Belum optimalnya penyusunan transkrip melalui ekspor data Microsoft Access untuk pembuatan template transkrip.
3. Belum tersedianya media perekaman rapat audio visual di semua ruang sidang.untuk bahan kelengkapan transkrip.

E. Teknik Analisis Isu (USG)

Tabel 1. Analisis Isu Menggunakan Teknik USG

Isu	U	S	G	Total	Ranking
Belum dimanfaatkannya template combo box dalam penyusunan transkrip. Hal ini dikarenakan belum adanya keseragaman format transkrip yang dapat memudahkan dan mempercepat pengaturan format transkrip yang membutuhkan waktu relatif lama.	5	4	4	12	1

<p>Belum adanya optimalisasi penyusunan transkrip melalui ekspor data Microsoft Access untuk pembuatan template.</p> <p>Hal ini dikarenakan belum adanya keseragaman format transkrip yang dapat memudahkan dan mempercepat pengaturan format transkrip yang membutuhkan waktu relatif lama termasuk untuk pencarian dan validasi nama pembicara.</p>	3	3	3	9	3
<p>Belum tersedianya media perekaman rapat audio visual di semua ruang sidang untuk bahan kelengkapan transkrip.</p> <p>Hal ini dikarenakan alat perekaman audio visual hanya ada di ruang sidang paripurna, dan di ruang rapat lainnya hanya didukung oleh cctv.</p>	2	4	4	10	2

Keterangan : (skor antara 1-5)

Perhitungan atau analisa menggunakan skala likert

1 = sangat kecil / rendah pengaruhnya dan

5 = sangat besar / tinggi pengaruhnya

U = Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan ditindaklanjuti

S = Seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dampaknya

G = Seberapa besar kemungkinan memburuknya suatu isu tidak ditangani

Sesuai analisis USG yang telah dilakukan di atas, maka isu yang dipilih adalah: "Belum Dimanfaatkannya Template Combo Box dalam Penyusunan Transkrip"

Dari penilaian tersebut, dapat dijelaskan bahwa:

Urgency jika permanaan fitur dalam transkrip tidak dioptimalkan untuk mempercepat proses penggeraan transkrip dengan template yang mudah diakses akan memperlambat proses penggeraan yang berakibat tidak terselesaikan tugas mentranskrip sesuai target dan jadwal.

Seriousness tentu ini akan menjadi permasalahan yang serius karena transkrip adalah bahan utama dari risalah resmi, semakin lambat transkrip diselesaikan maka pembuatan risalah rapat sementara akan semakin lambat.

Growth jika isu ini dibiarkan saja pastinya akan mengurangi efektifitas kerja yang berujung pada menumpuknya kaset-kaset rekaman rapat lama yang terbengkalai dan hasil transkrip tidak bisa diserahkan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

F. Gagasan Pemecahan Isu

Untuk memecahkan isu tersebut, penulis memilih untuk memanfaatkan fitur *combo box* untuk pembuatan *template* transkrip. *Combo box* atau dalam bahasa Indonesia adalah kotak kombo merupakan sebuah elemen form berbentuk kotak yang apabila diklik akan menampilkan list menu kebawah (drop down list). *Combo box* lebih efisien digunakan jika opsi yang ingin dimasukkan relatif banyak. Dengan menggunakan *combo box*, *form* akan terlihat lebih simpel karena hanya dibutuhkan satu baris saja seperti input *check box*.

Kotak kombo adalah *widget* antarmuka pengguna grafis (atau kontrol) yang umum digunakan. Secara tradisional, ini adalah kombinasi dari daftar *drop-down* atau kotak daftar dan kotak teks yang dapat diedit satu baris, yang memungkinkan pengguna untuk mengetik nilai secara langsung atau memilih nilai dari daftar. Istilah "kotak kombo" kadang-kadang digunakan untuk berarti "daftar *drop-down*". Proses memilih pada *combo box* dilakukan dengan cara mengklik *combo box* tersebut, maka akan

tampil sebuah daftar teks secara keseluruhan di dalam *combo box* tersebut, lalu klik salah satu teks yang akan dipilih dari *combo box* tersebut.

Berikut adalah isian format *template combo box*:

- a) nomor halaman

nomor halaman sudah otomatis tertulis pada lembar transkrip tanpa harus mengatur header dan footer.

- b) tanggal rapat

keterangan rapat sebagai bahan kelengkapan transkrip juga perlu dimasukkan dalam transkrip untuk meminimalisir kesalahan dengan memanfaatkan fitur *Date Picker Content Control* pada *tab developer*.

- c) side kaset

keterangan side kaset a atau b perlu dijelaskan dalam transkrip untuk mempermudah pengoreksian transkrip untuk segera menjadi risalah dengan memanfaatkan fitur *Combo Box* pada *tab developer*.

- d) nama transkriptor

dalam hal ini penulisan nama transkriptor berguna untuk mengurangi kerancuan hasil kerja dengan pemanfaatan fitur *Combo Box* pada *tab developer* yang memuat nama seluruh asisten perisalah legislatif terampil atau transkriptor yang mengerjakan transkrip tersebut.

- e) tanggal penggerjaan

tanggal penggerjaan perlu dituliskan dalam hasil transkrip untuk meminimalisir penggerjaan transkrip yang terlalu lamban dan tidak terukur dalam hal waktu. Jadi, setiap penggerjaan transkrip, transkriptor akan selalu melihat tanggal mulai penggerjaan setelah

diisikan pada awal mentranskrip dengan fitur *Date Picker Content Control* pada *tab developer*.

- f) daftar nama pembicara (560 orang anggota dewan)
- proses penulisan nama pembicara pada transkrip membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memindahkan dari web DPR ke lembar kerja untuk itu diperlukan *shortcut* salah satunya dengan pemanfaatan fitur *Combo Box* yang menampung asal fraksi, nama lengkap, dan juga gelar anggota dewan.

Format yang diatur secara baku dalam penyusunan template adalah model/lay out dasar yang sesuai dengan tata naskah DPR, meliputi:

- a. Font size : Arial, ukuran 12
- b. Margin atas : 2,54 cm (1 inchi)
- c. Margin bawah : 2,54 cm (1 inchi)
- d. Margin kiri : 3,17 cm (1,25 inchi)
- e. Margin kanan: 3,17 cm (1,25 inchi)
- f. Ukuran kertas: A4
- g. Line spacing : 1 (single)
- h. Header/footer: 0,5" (halaman di tengah atas, contoh - 2-)

Dengan adanya format diatas seperti menampilkan *tab developer* dan *controls* meliputi format *font*, *header*, penambahan *combo box* untuk nama pembicara, dan juga pengaturan *margin* yang sesuai aturan resmi tata naskah DPR penggerjaan transkrip bisa lebih cepat.

G. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari pembuatan template transkrip adalah untuk mempercepat penyelesaian risalah rapat sementara agar dapat menjadi risalah rapat sesuai target waktu yang ditentukan.

H. Manfaat

Internal:

1. Optimalisasi kualitas dan kecepatan penulisan objek dalam penyusunan transkrip dengan format yang rapi dan mudah dalam pengeditan menjadi risalah resmi.
2. Meningkatkan kualitas hasil transkrip dengan keseragaman format transkrip dan meminimalisir kesalahan.

Eksternal:

1. Menjadi bukti otentik pelaksanaan rapat oleh DPR RI.
2. Sebagai pembuktian kinerja DPR RI

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. RANCANGAN AKTUALISASI

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / hasil	Keterkaitan substansi mata pelatihan	Kontribusi terhadap visi-misi organisasi	Penguatan nilai organisasi
1.	Persetujuan mentor	1.1 Mengajukan isu yang akan dibahas kepada mentor 1.2 Konsultasi dengan mentor 1.3 Meminta persetujuan mentor	Rancangan Aktualisasi Catatan Isu utama	Nilai Dasar PNS: 1. Akuntabilitas menerapkan nilai-nilai transparansi, bertanggung jawab dan kejelasan . 2. Nasionalisme , menerapkan nilai-nilai kerjasama, kepentingan bersama 3. Etika Publik , menerapkan nilai-nilai komunikasi yang baik.	Seluruh rangkaian kegiatan ini mendukung visi organisasi yaitu terwujudnya dukungan persidangan komisi dan persidangan paripurna yang profesional dan akuntabel. Kemudian mendukung misi dalam mewujudkan dukungan mendukung misi dalam mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan Persidangan	1. Akuntabel, efisiensi kerja dengan pemanfaatan combo box maka Bagian Risalah telah telah menerapkan prinsip akuntabel karena risalah rapat dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. 2. Profesional dengan melakukan kegiatan ini maka seorang asisten perisalah legislatif dapat melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksi. 3. Integritas, dengan melakukan kegiatan ini maka asisten perisalah telah menerapkan nilai-nilai disiplin dalam bekerja
.2.	Membuat template transkrip dengan combo box	2.1 Pencarian database nama anggota dewan dan asal fraksi/partai di web instansi	Adobe PDF	Nilai Dasar PNS: 1. Akuntabilitas menerapkan nilai-nilai transparansi, teliti, cepat, profesional dalam		

		www.dpr.go.id/		pelayanan	Paripurna, mewujudkan kebijakan penyelenggaraan dukungan persidangan di Komisi dan Persidangan Paripurna.	
		2.2 Menginput database nama anggota dewan	Database	2. Komitmen mutu , menerapkan nilai-nilai efektif dan efisien untuk menjalankan tugas fungsi. 3. Nasionalisme , nilai inisiatif untuk memberikan informasi secara detil.		
		2.3 Membuat template dengan combo box	Template	Pelayanan publik		
3.	Komparasi pengajaran transkrip	3.1 Melakukan transkrip tanpa template	Transkrip	Nilai dasar PNS: 1. Akuntabilitas , menerapkan nilai-nilai jujur dan profesional.		
		3.2 Melakukan transkrip dengan template	Transkrip	2. Anti korupsi , menerapkan nilai laporan sesuai hasil dan tanpa manipulasi data.		
		3.3 Membandingkan hasil dan waktu pengajaran	Analisa	3. Komitmen mutu , menerapkan nilai kualitas dan evaluasi hasil.		

	5.2 Pembagian kuesioner	Kritik dan Saran	<p>2. Etika Publik, komunikasi yang baik antara user dan juga pembuat template untuk memastikan template sudah bagus.</p> <p>3. Komitmen mutu, template selalu dapat diperbaiki oleh user sehingga bisa dilakukan update saat PAW (Pergantian Antar Waktu) untuk dewan. nilai profesional dalam pencapaian tujuan efisiensi kerja.</p>	
	5.3 Evaluasi	Testimoni		

Tabel 2. Rancangan Aktualisasi

1

PERSETUJUAN MENTOR

- 1.1 Mengajukan isu yang akan dibahas kepada mentor
- 1.2 Konsultasi dengan mentor
- 1.3 Meminta persetujuan mentor

3

KOMPARASI PENGERJAAN TRANSKRIP

- 3.1 Melakukan transkrip tanpa template
- 3.2 Melakukan transkrip dengan template
- 3.3 Membandingkan hasil dan waktu penggerjaan

Pelaksanaan Aktualisasi

"Penyusunan Transkrip dengan Menggunakan Template Combo Box"

4

SOSIALISASI PENGGUNAAN TEMPLATE

- 4.1 Mengundang APL dan PL
- 4.2 Sosialisasi
- 4.3 Tanya jawab

2

MEMBUAT TEMPLATE TRANSKRIP DENGAN COMBO BOX

- 2.1 Pencarian database nama anggota dewan
- 2.2 Input database nama anggota dewan
- 2.3 Membuat template combo box

5

EVALUASI

- 5.1 Pembuatan kuesioner
- 5.2 Pembagian kuesioner
- 5.3 Evaluasi

Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

TABEL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bukti Fisik
Persetujuan mentor	Mengajukan isu yang akan dibahas kepada mentor. Menentukan isu mana yang akan diangkat menjadi isu utama.	23 September 2019	Screen capture sosial media dan e-mail.
	Konsultasi dengan mentor mengenai permasalahan utama dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.	25 September 2019	Foto evidence
	Meminta persetujuan mentor dan menetapkan isu.	26 September 2019	Rancangan aktualisasi dan foto evidence
Membuat template transkrip dengan combo box	Pencarian database nama anggota dewan dan asal fraksi/partai di web instansi www.dpr.go.id/	2 Oktober 2019	Screen capture
	Menginput database nama anggota Dewan tahun 2014-2019 dan 2019-2024	3 Oktober 2019	Screen capture
	Membuat template transkrip dengan combo box.	4 Oktober 2019 – 18 Oktober 2019	Screen capture

Komparasi penggerjaan	Pengerjaan tanpa template	21 Oktober 2019 - 23 Oktober 2019	lampiran transkrip	hasil
	Pengerjaan transkrip dengan template	24 Oktober 2019 - 25 Oktober 2019	lampiran transkrip	hasil
	Membandingkan hasil dan waktu	28 Oktober 2019 – 1 November 2019	testimoni kuesioner	berupa
Sosialisasi penggunaan template	Mengundang APL dan PL	4 November 2019	Undangan	
	Sosialisasi	5 November 2019	Foto evidence	
	tanya jawab	5 November 2019	catatan notulen	
Evaluasi template transkrip	pembuatan kuesioner	29 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019	Screen capture	
	pembagian kuesioner	5 November 2019	foto evidence	
	Evaluasi	6 November 2019 – 11 November 2019	foto evidence	

Tabel 3. Rekap Evidence Kegiatan

B. Deskripsi Kegiatan

1. Persetujuan Mentor

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menentukan isu yang dipilih dari ketiga isu yang terjadi di Bagian Risalah yang dikerucutkan berdasarkan *urgency*, *seriousness*, dan *growth* sehingga didapatkan isu yang paling dominan berdasarkan ranking dan persetujuan mentor.

1) Tahapan kegiatan dan output

Kegiatan persetujuan mentor terdiri dari 3 tahapan kegiatan, yaitu:

a. Mengajukan isu yang akan dibahas kepada mentor

Dalam tahap ini, pada kegiatan *in class*, penulis menentukan isu berdasarkan teknik analisis USG Isu yang penulis pilih ada tiga yaitu belum optimalnya penggunaan media pencarian kata dalam rangka perbaikan risalah rapat sementara, belum tersedianya database risalah rapat, belum teridentifikasinya waktu dan nama pembicara saat rapat. Output dari tahapan kegiatan ini adalah *screen capture* sosial media (*whatsapp*) email pada saat berdiskusi dengan mentor.

b. Konsultasi dengan mentor

Pada tahap ini, penulis berdiskusi dengan mentor. Pada tahap ini, mentor memberikan pertimbangan dan mengarahkan isu mana yang lebih *applicable* sesuai dengan jabatan yang diemban penulis. Output tahapan kegiatan ini adalah foto *evidence* saat konsultasi.

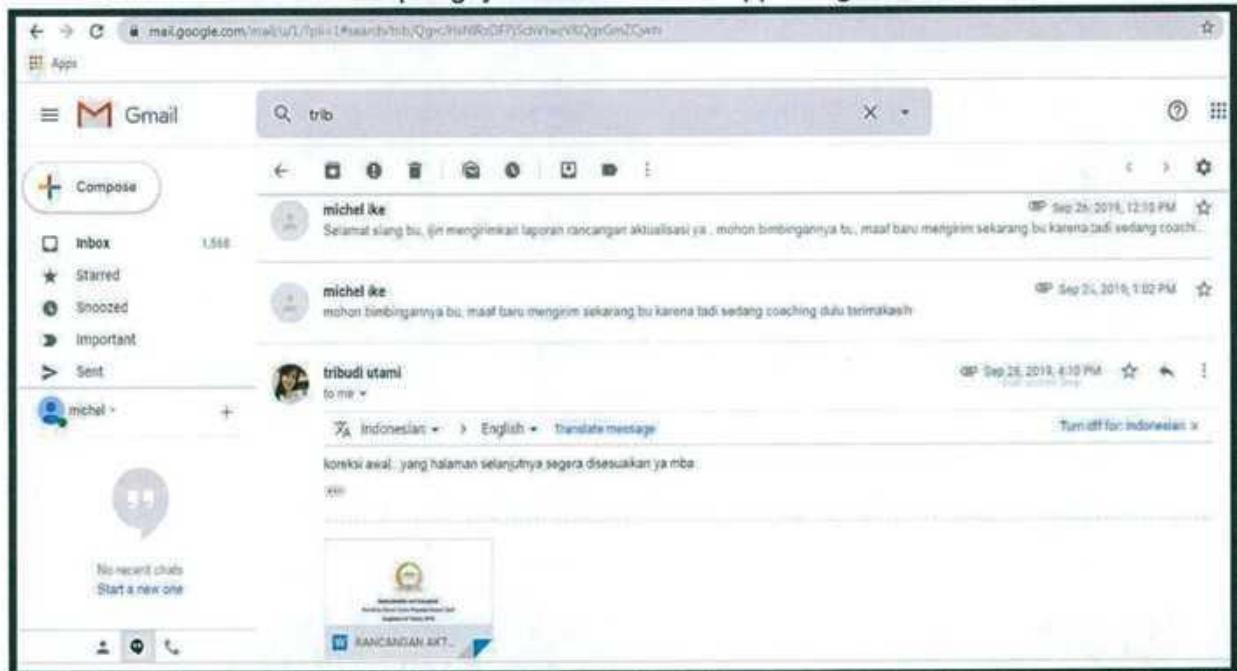
c. Meminta persetujuan mentor

Pada tahap ini mentor dan penulis mendiskusikan isu yang dipilih dan menetapkan satu isu yang akan diangkat, kemudian memberikan masukan apa saja tahapan yang kira-kira harus dikerjakan selama menjalankan kegiatan aktualisasi sesuai dengan isu yang dipilih. Output tahapan kegiatan ini adalah Rancangan Aktualisasi yang telah

dikumpulkan dalam kegiatan Latsar CPNS dan foto evidence saat diskusi.



Gambar 3. Konsultasi pengajuan isu via whatsapp dengan mentor



Gambar 4. Berdiskusi via e-mail dengan mentor



Gambar 5. Berdiskusi secara langsung untuk
menetapkan isu utama dengan mentor

2. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Terdapat dua nilai dasar ASN yang terkait dengan kegiatan penentuan isu yaitu:
 - a) Akuntabilitas
Pada saat penentuan isu yang dipilih kegiatan ini berkaitan dengan penerapan aspek kejelasan dalam penyusunan transkrip dan tanggung jawab dimana sangat erat kaitannya dengan tugas jabatan yang diemban penulis sebagai asisten perisalah legislatif.
 - b) Nasionalisme
Menerapkan nilai-nilai kerjasama dan kepentingan bersama. Tahapan diskusi dengan mentor, merupakan salah satu implementasi nilai-nilai kerjasama di Bidang Risalah untuk menentukan isu yang aktual dan penyelesaiannya secara *applicable* untuk kepentingan bersama bidang risalah.
 - c) Etika Publik

Menerapkan nilai-nilai komunikasi yang baik. Tahap ini merupakan suatu bentuk penerapan nilai-nilai dasar etika publik seperti bagaimana cara berkomunikasi yang baik terhadap rekan kerja.

3. Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan penentuan isu ini, yaitu:

a) Akuntabel

Menentukan isu yang dipilih sebagai bentuk tanggung jawab penulis dalam rangka mengemban tugas jabatan yang diberikan dan dapat dipertanggungjawabkan.

b) Profesional

Profesional dimaknai sebagai suatu kemampuan bekerja sesuai dengan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM. Dengan melakukan penentuan isu maka hal ini menggambarkan suatu upaya untuk bekerja sesuai dengan kompetensi karena dengan menentukan isu tersebut dapat diketahui bahwa hal tersebut memang perlu menjadi perhatian terutama di Bagian Risalah serta dapat mempermudah penulis dalam dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai asisten perisalah legislatif

c) Integritas

Integritas merupakan tindakan dimana seseorang harus bertindak secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan sesuai dengan nilai-nilai maupun kode etik. Hal ini tentunya sangat terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Dengan melakukan penentuan isu, maka hal ini menunjukkan upaya adanya nilai-nilai disiplin dalam bekerja karena sebagai asisten perisalah legislatif, diharapkan mampu bekerja dengan penuh integritas sesuai dengan tugas jabatan.

2. Membuat template transkrip dengan combo box

Tujuan kegiatan pembuatan template adalah untuk mempercepat proses penggerjaan transkrip. Tahapan ini terdiri dari tiga tahapan kegiatan. Pertama, yaitu pencarian nama anggota dewan di web DPR. Kedua, menginput nama anggota dewan. Ketiga, adalah pembuatan template combo box. Ketiga tahapan kegiatan ini diharapkan dapat mempermudah penulis dalam mengerjakan transkrip.

1) Tahapan kegiatan dan output

Pada kegiatan pembuatan template transkrip terdapat 3 tahapan kegiatan, yaitu:

a. Pencarian database nama anggota dewan

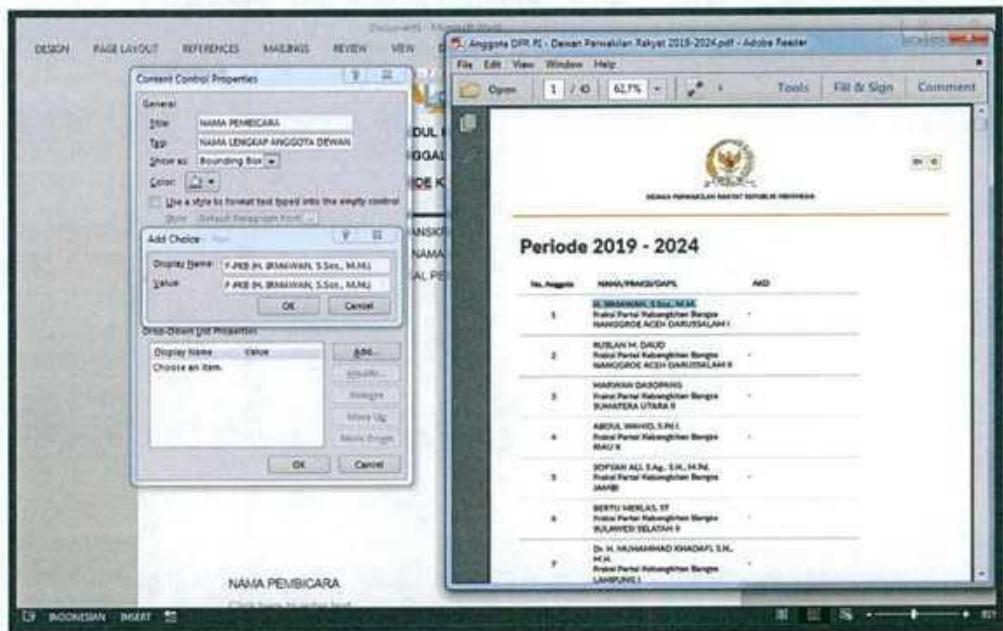
Tujuan Pencarian database nama anggota dewan dan asal fraksi/partai di web instansi www.dpr.go.id/ bertujuan mencari sumber data yang valid untuk bahan pembuatan transkrip. Pada tahap ini penulis wajib mengunduh data nama anggota per periode untuk mengantisipasi pergantian data anggota dewan terutama saat PAW (Pergantian Antar Waktu) karena dalam portal resmi akan otomatis terupgrade tanpa adanya data anggota periode sebelumnya. Output yang dihasilkan adalah Adobe PDF yang diunduh dari laman instansi sebagai sumber data input.



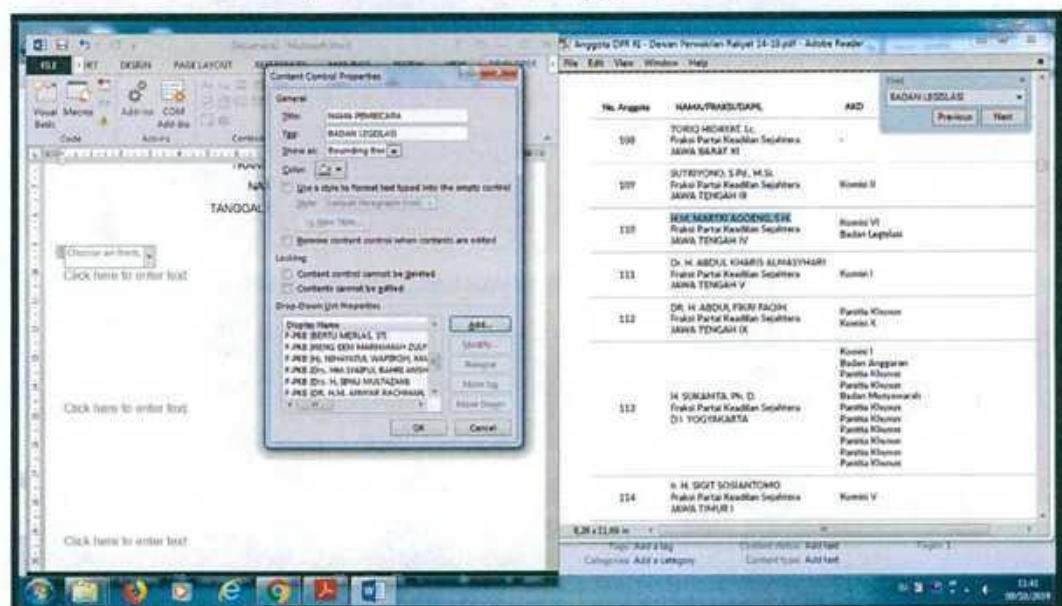
Gambar 6. Pencarian dan pengunduhan data anggota dewan di dpr.go.id

b. Menginput database nama anggota dewan

Penginputan database nama anggota dewan bertujuan untuk memasukkan sumber data dari PDF ke microsoft word sebagai bahan pembuatan combo box untuk template. Pada tahap ini penulis memasukkan nama anggota dewan periode 2014-2019, 2019-2024, dan juga membuat sampel per AKD. Output yang dihasilkan adalah database dalam tab developer microsoft word.



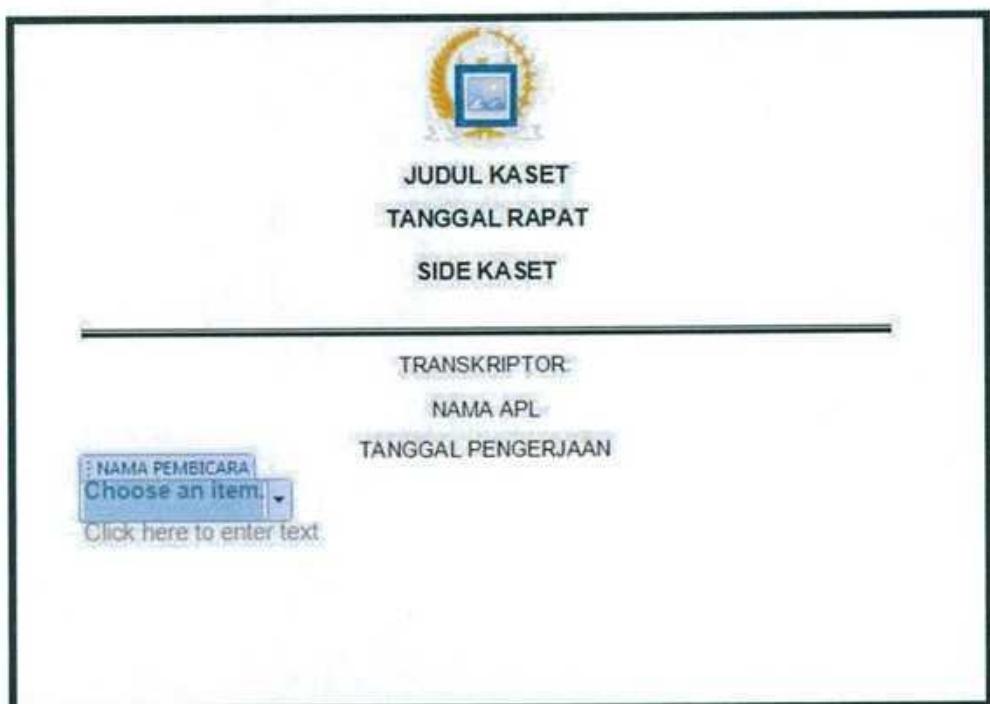
Gambar 7. Proses input database nama anggota periode 2019-2024



Gambar 8. Proses input database anggota Baleg atau per AKD

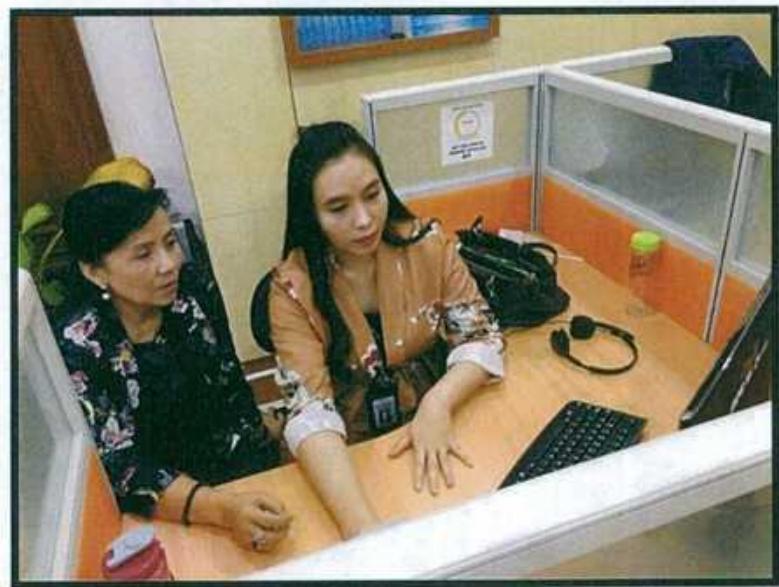
c. Membuat template combo box

Setelah menginput database hal berikutnya ialah mulai merancang format template dan kelengkapannya meliputi nomor halaman, judul kaset, tanggal rapat side kaset, transkriptor, tanggal penggerjaan, dan nama pembicara, asal fraksi, beserta gelar lengkapnya, juga format penulisan sesuai dengan format tata naskah DPR RI. Output pembuatan template combo box ini adalah template dengan ekstensi .dotx. (Lampiran 1)



Gambar 9. Hasil pembuatan template combo box

Setelah pembuatan template, penulis menunjukkan hasil kepada mentor mengenai hasil dan cara penggunaan template, beitu juga sebaliknya, mentor memberikan masukan-masukan yang *applicable*.



Gambar 10. Konsultasi dengan mentor untuk finishing template

Setelah berkonsultasi dengan mentor, penulis juga berkonsultasi dengan coach mengenai template tersebut.



Gambar 11. Konsultasi dengan coach menyampaikan perkembangan penggeraan aktualisasi dan meminta saran tentang template

- 2) Keterkaitan substansi mata pelatihan. Terdapat dua nilai dasar

ASN yang terkait dengan kegiatan pembuatan template transkrip combo box yaitu:

a) Akuntabilitas

Pada saat pembuatan template combo box menerapkan nilai-nilai dalam aspek ketelitian, cepat, profesional dalam pelayanan. Tahapan ini berkaitan dengan nilai ketelitian saat penginputan data, kecepatan untuk memasukkan nama anggota perode lama 560 orang, anggota baru 575, dan nama anggota per AKD dengan jumlah anggota yang berbeda-beda tiap AKD. Pembuatan template ini juga untuk menunjang keprofesionalan penulis dalam pelayanan pembuatan transkrip untuk akhirnya bisa dijadikan risalah.

b) Komitmen mutu,

Pada tahapan ini penulis menerapkan nilai-nilai efektif dan efisien untuk menjalankan tugas fungsi dengan menjaga nilai komitmen mutu. Salah satu cara menjaga komitmen mutu adalah membuat template ini untuk menyeragamkan format transkrip, mempermudah penggerjaan, dan memvalidasi nama pembicara.

c) Nasionalisme,

Penerapan nilai inisiatif untuk memberikan informasi secara detil tercermin dari tahapan ini. Dengan adanya fasilitas combo box yang membantu proses penulisan nama pembicara lengkap dengan nama fraksi dan gelarnya tanpa harus melihat dari web resmi atau dengan kata lain dapat dilakukan secara off internet.

Peran dan kedudukan fungsi ASN pelayanan publik dengan cara pemanfaatan fitur combo box dalam pembuatan template transkrip rapat dengan mengedepankan nilai akuntabilitas, komitmen mutu, dan nasionalisme dapat mendukung pelayanan publik yang baik dan kredibel kepada anggota dewan dan instansi terkait.

3. Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan pembuatan template combo box ini, yaitu:

a) Akuntabel

Melakukan pengembangan dan pemanfaatan fitur dalam kegiatan transkrip merupakan suatu upaya bagi asisten perisalah legislatif dalam melaksanakan pertanggungjawaban terhadap tugas jabatan untuk meningkatkan efektifitas kerja dalam rangka penggerjaan transkrip untuk segera dijadikan risalah rapat sementara.

b) Profesional

Dengan membuat template diperlukan juga koordinasi kepada asisten perisalah legislatif dan perisalah legislatif maka hal ini menggambarkan suatu upaya untuk bekerja sesuai dengan kompetensi karena dengan melakukan pengolahan dokumen tersebut akan membantu asisten perisalah dan perisalah khususnya Bagian Risalah itu sendiri dalam memberikan suatu capaian untuk pemanfaatan waktu dan kualitas risalah rapat sementara semakin meningkat setelah difasilitasi template dan diharapkan kedepannya dapat menjadi risalah rapat resmi.

c) Integritas

Dengan adanya template untuk penggerjaan transkrip rapat diharapkan adanya kesesuaian dan keseragaman format transkrip dan mempermudah perisalah untuk pengeditan risalah rapat sementara yang dibuat dengan kondisi sebenarnya pada saat rapat di DPR RI berlangsung untuk segera dijadikan risalah rapat resmi sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

3. Komparasi penggerjaan transkrip

Kegiatan ini bertujuan untuk membandingkan hasil transkrip antara sebelum menggunakan template dan sesudah menggunakan template. Selain itu cara membandingkan dilakukan dengan estimasi waktu dan kemudahan yang diberikan saat proses penggerjaan

transkrip.

1) Tahapan kegiatan dan output

Pada tahapan komparasi terdapat 3 langkah, yaitu:

a) Penggerjaan tanpa template

Tujuan tahapan kegiatan ini adalah untuk obyek pembanding hasil transkrip dengan template agar pengguna bisa membandingkan dari aspek kerapian dan kecepatan. Output yang dihasilkan adalah hasil transkrip.

Sebelum user sampel mengerjakan transkrip dengan template, penulis mendistribusikan template sesuai dengan AKD masing-masing asisten.



Gambar 12. File sharing template per AKD terhadap 5 user sampel
(1 perisalah, dan 4 asisten perisalah)

b) Penggerjaan transkrip dengan template

Tujuan tahapan kegiatan ini untuk mengetahui hasil transkrip dengan template agar pengguna bisa merasakan manfaat dan membandingkan dari aspek kerapian dan kecepatan. Output yang dihasilkan adalah hasil transkrip. Pada penggerjaan transkrip, penulis membuat 5 sampel transkrip per AKD yaitu transkrip untuk Komisi I, Komisi II, Komisi IV, MKD (Mahkamah

Kehormatan Dewan, dan BALEG.(Badan Legislasi).

Berikut ini adalah gambar saat pengerajan transkrip oleh asisten perisalah legislatif.



Gambar 13. Mengerjakan transkrip rapat MKD dengan template combo box

c) Membandingkan hasil dan waktu

Tahapan kegiatan ini sebagai tahap akhir komparasi, dimana outputnya berupa analisa hasil transkrip dari sebelum menggunakan template dan sesudah menggunakan template. Bahan analisa berupa google form yang akan penulis berikan pada user sampel untuk diisi. Isi google form berupa pertanyaan, opini, sampai kritik dan saran sebelum disosialisasikan pada seluruh asisten perisalah dan perisalah.

KUESIONER PELAKSANAAN AKTUALISASI

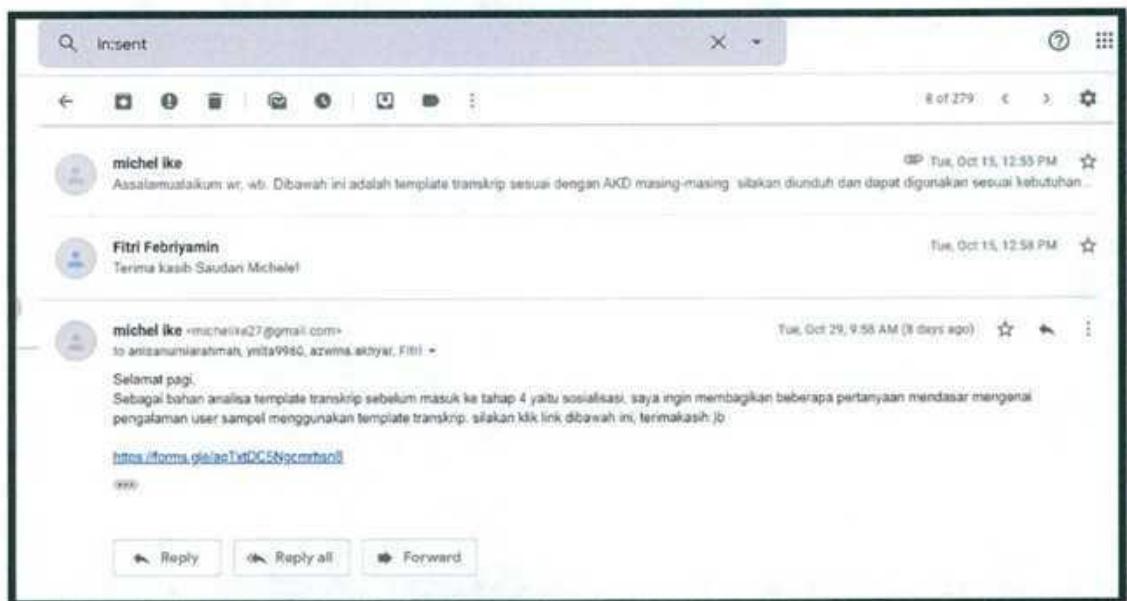
Template transkrip berikut ini adalah media berfile yang berisi bentuk contoh dalam bentuk file docx dalam DCF yang cocok format penulisan yang seluruh desain form hasil DCF-PI dan ditulis oleh dosen tematik dengan tampilan box.

Transkrip transkrip dapat ditranskripsikan dengan desain yang seluruh penulisan dalam bentuk DCF-PI (dokumen Microsoft Word) dengan tampilan box.

Transkrip yang ditulis dalam bentuk box ini dapat dituliskan dengan tampilan box.

Nama Lengkap

Gambar 14. Pembuatan kuesioner untuk bahan analisa hasil dan waktu penggunaan template combo box



Gambar 15. Pengiriman kuesioner untuk sampel user per AKD.

Timestamp	Nama Lengkap	Jabatan	Penempatan	DAFTAR PERTANYAAN SINGKAT				
				Cara Pengaturan Transkrip	Kapan mengatur format halaman	Apakah menggunakan format tata naskah DPR RI saat transkrip	Pernahkah format yang telah diatur berubah dan tidak sesuai dengan tata naskah DPR	Apa yang dilakukan untuk memastikan format transkrip tidak berubah
11/5/2019 13:00:20	Fitri Febriyamin	APL	MKD	copy paste transkrip sebelumnya	awal penggerjaan	ya, selalu	pernah	memakai template transkrip combo box
11/5/2019 13:00:29	Anisa Nur Nia Rahmah	PL	Komisi I	copy paste transkrip sebelumnya	awal penggerjaan	ya, selalu	sering	mengedit ulang
11/5/2019 13:39:31	Azwina Zahra Akhyar	APL	Komisi IV	copy paste transkrip sebelumnya	awal penggerjaan	kadang-kadang	pernah	memakai template transkrip combo box
11/5/2019 14:21:42	Nita Setya Efriyani	APL	BALEG	manual	awal penggerjaan	kadang-kadang	pernah	memakai template transkrip combo box
11/5/2019 14:34:04	Oki Rusera Azhari Virgian Puswanda	PL	Komisi VIII	manual	mengerjakan sambil mengatur	ya, selalu	tidak pernah	mengedit ulang

TABEL 4. Rekap jawaban responden dari hasil kuesioner pertanyaan singkat

sampel user template transkrip combo box

PERTANYAAN DESKRIPTIF		
Perlukah keseragaman format dalam penulisan transkrip rapat	Bagaimana pengalaman menggunakan template transkrip combo box	Respon dan saran
Perlu, karena untuk memudahkan dan mempercepat proses transkrip	Sangat memudahkan, tidak perlu mengatur format penulisan lagi	Sangat berguna dan memudahkan!
Perlu untuk keseragaman	Sangat memudahkan. Efisien dan efektif dalam penggerjaan transkrip. Sebagai PL template transkrip combo box akan menawarkan keakuratan	Perlu digunakan secara menyeluruh
Perlu, agak lebih rapi dan konsisten	Memudahkan dalam penulisan nama pembicara dan menghemat waktu	Semoga template ini bisa lebih dikenal banyak APL lain agar terjadi keseragaman format transkrip
Iya perlu . Karena itu sangat penting untuk proses penggerjaan sehingga hasil kerja menjadi rapi	Sangat membantu. Dan mempercepat penggerjaan transkrip.	Ini merupakan suatu tools kerja yang sangat membantu untuk penggerjaan transkrip, namun ada baiknya dapat dicontohkan atau demo kan cara penggunaan template ini
Sangat perlu, karena dengan adanya keseragaman maka kedepannya akan mempermudah dan mempercepat perisalah dalam menyusun risalah rapat sehingga risalah dapat langsung terdistribusikan.	Penggunaan transkrip combo bagi saya sangat efektif dalam mempersingkat waktu kerja pembuatan risalah rapat.	Saya berharap kedepannya program ini dapat segera di implementasikan karena sangat membantu kami dalam menyusun sebuah risalah rapat

TABEL 5. Rekap jawaban responden dari hasil kuesioner pertanyaan deskriptif
sampel user template transkrip combo box

2. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Terdapat tiga nilai dasar ASN yang terkait dengan tahapan kegiatan komparasi penggeraan transkrip yaitu:

a) **Akuntabilitas**

Pada kegiatan komparasi penggeraan transkrip menerapkan nilai-nilai jujur dan profesional dalam melakukan perbandingan baik dari penulis ketika melakukan analisa komparasi maupun dari user sampel ketika mengutarakan opini maupun saran mengenai template transkrip.

b) **Anti korupsi**

Penerapan nilai anti korupsi dalam kegiatan komparasi penggeraan transkrip dilakukan sesuai hasil apa adanya dan tanpa manipulasi data penambahan dan pengurangan apapun.

c) **Komitmen mutu**

Pada tahapan komparasi penggeraan transkrip mengutamakan nilai kualitas dan evaluasi hasil karena dengan membandingkan hasil template sebelum dan sesudah template hal itu menunjukkan kegiatan tersebut dapat digunakan sebagai bahan dasar evaluasi untuk penyempurnaan template sesuai dengan kebutuhan user.

3. Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan tahapan kegiatan komparasi penggeraan transkrip, yaitu:

a) **Akuntabel**

Nilai organisasi akuntabel dapat diterapkan pada kegiatan komparasi atau perbandingan penggeraan transkrip. Kegiatan tersebut merupakan suatu upaya bagi asisten perisalah legislatif dalam melaksanakan pertanggungjawaban terhadap tugas jabatan untuk meningkatkan efektifitas kerja dalam rangka penggeraan transkrip untuk segera dijadikan risalah rapat sementara.

b) Profesional

Dengan membuat template diperlukan juga komparasi transkrip sesudah dan sebelum menggunakan template kepada asisten perisalah legislatif dan perisalah legislatif pengguna template maka hal ini menggambarkan suatu upaya untuk bekerja sesuai dengan kompetensi karena dengan melakukan pengolahan dokumen tersebut akan membantu asisten perisalah dan perisalah khususnya Bagian Risalah itu sendiri dalam memberikan suatu capaian untuk perbandingan pemanfaatan waktu dan kualitas risalah rapat sementara semakin meningkat setelah difasilitasi template dan diharapkan kedepannya dapat menjadi risalah rapat resmi.

c) Integritas

Untuk penggerjaan transkrip rapat diharapkan adanya kesesuaian dan keseragaman format transkrip yang nilai didalamnya terhadap penerapan nilai integritas. Kegiatan ini diharapkan dapat mempermudah perisalah untuk pengeditan risalah rapat sementara yang dibuat dengan kondisi sebenarnya pada saat rapat di DPR RI berlangsung tanpa mengurangi dan menambahkan kalimat-kalimat yang mengandung unsur konflik kepentingan tertentu.

4. Sosialisasi Penggunaan Template

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi pada perisalah dan asisten perisalah mengenai apa dan bagaimana cara menggunakan template transkrip untuk memaksimalkan fitur-fitur yang terdapat dalam microsoft word.

1) Tahapan kegiatan dan output

Pada tahapan sosialisasi terdapat 3 langkah, yaitu:

a) Mengundang Asisten Perisalah Legislatif dan Perisalah Legislatif

Tujuan tahapan kegiatan ini adalah untuk memberikan undangan dan pemberitahuan tertulis maupun lewat media sosial (whatsapp) mengenai sosialisasi yang akan dilakukan.

Output berupa undangan dan diskusi dalam forum internal.

b) Sosialisasi

Tujuan tahapan kegiatan ini untuk menyampaikan informasi mengenai template yang dibuat penulis agar asisten perisalah dan perisalah bisa merasakan manfaat dan membandingkan dari aspek kerapian dan kecepatan. Output yang dihasilkan adalah notulen hasil sosialisasi.



Gambar 16. Sosialisasi Pelaksanaan Aktualisasi

c) Tanya jawab

Tahapan kegiatan ini sebagai tahap akhir sosialisasi, dimana outputnya berupa diskusi forum. Pada kesempatan ini, user dan asisten perisalah legislatif, serta perisalah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan mengenai cara penggunaan maupun saran-saran yang dapat membangun untuk penyempurnaan template.



Gambar 17. Sesi tanya jawab dengan Asisten Perisalah Legislatif Komisi VI dan Komisi X.

2. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Terdapat tiga nilai dasar ASN yang terkait dengan tahapan kegiatan sosialisasi penggunaan template yaitu:

a) **Akuntabilitas**

Pada kegiatan sosialisasi menerapkan nilai adil dan merata dalam penguatan kompetensi dilakukan melalui pemberian informasi tentang cara penggunaan template.

b) **Etika Publik**

Penerapan nilai etika publik seperti menjalin komunikasi yang baik saat sosialisasi penggunaan template yang berdaya guna untuk peningkatan kinerja asisten perisalah dan perisalah di bagian risalah. Melakukan sosialisasi dan menyajikan template transkrip dengan internal unit kerja merupakan salah satu bentuk perwujudan dari etika publik, dimana penulis dalam melakukan tugas jabatan sebagai perisalah tidak luput dari kegiatan berkoordinasi dengan pegawai lain di Bagian Risalah. Ini merupakan salah satu bentuk komunikasi publik yang harus dimiliki oleh ASN. Sebagai bentuk pelayanan, seorang ASN harus memiliki sopan santun, keramahan, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama untuk mendapatkan hasil

yang optimal bagi perbaikan risalah rapat sementara

c) **Nasionalisme**

Kegiatan sosialisasi menerapkan nilai diskusi dan musyawarah untuk saling membagikan cara pengoperasian template. Dibutuhkan diskusi mengenai template apa yang dibutuhkan untuk memfasilitasi pengerjaan transkrip dan juga musyawarah dalam sosialisasi ini untuk memaksimalkan kerja bagian risalah.

Peran dan kedudukan ASN Whole of Government ditunjukkan dalam koordinasi unit internal antar jabatan asisten perisalah dan perisalah, juga terdapat koordinasi antara jabatan asisten mahir dan perisalah madya dalam pembuatan template.

3. Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan sosialisasi, yaitu:

a) **Akuntabel**

Nilai organisasi akuntabel dapat diterapkan pada kegiatan komparasi atau perbandingan pengerjaan transkrip. Kegiatan tersebut merupakan suatu upaya bagi asisten perisalah legislatif dalam melaksanakan pertanggungjawaban terhadap tugas jabatan mengenai pengerjaan transkrip untuk meningkatkan efektifitas kerja.

b) **Profesional**

Dengan adanya sosialisasi diperlukan juga koordinasi dan konsultasi dengan mentor maupun pegawai di bagian risalah khususnya asisten perisalah dan perisalah. Hal ini menggambarkan suatu upaya untuk bekerja sesuai dengan kompetensi karena dengan melakukan sosialisasi mengenai suatu inovasi baru akan membantu asisten perisalah dan perisalah khususnya Bagian Risalah itu sendiri dalam memberikan suatu perolehan kinerja yang sesuai dengan waktu yang telah dikeluarkan untuk mengerjakan suatu transkrip.

5. Evaluasi

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bahan evaluasi bagi penulis mengenai fasilitas template seperti apa yang dibutuhkan oleh user, bagaimana pendapat, saran dan kritik mengenai template yang telah digunakan melalui pembuatan kuesioner. Evaluasi kuesioner ini dilakukan setelah sosialisasi dan setelah penyempurnaan template yang pertama untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan.

1) Tahapan kegiatan dan output

Pada tahapan evaluasi terdapat 3 langkah, yaitu:

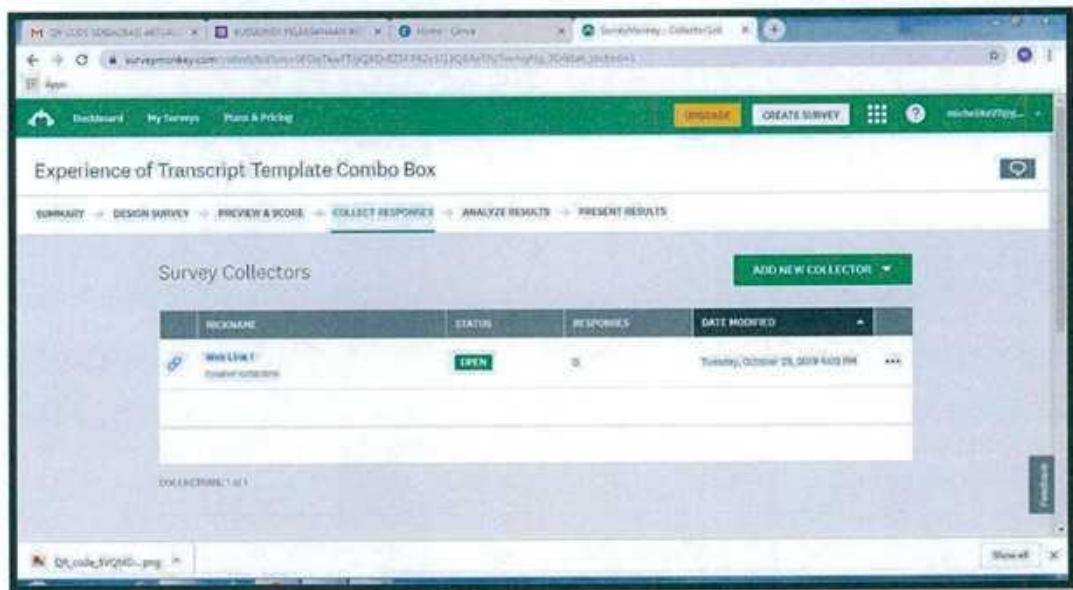
a) Pembuatan kuesioner

Tujuan tahapan kegiatan ini adalah untuk merancang aspek apa saja yang akan ditanyakan pada responden yang sekitarnya dapat membantu penulis untuk menyempurnakan template. Outputnya adalah kuesioner.

Gambar 14. Pembuatan kuesioner setelah sosialisasi

b) Pembagian kuesioner

Tujuan tahapan kegiatan ini mendistribusikan output kuesioner yang telah dibuat dan memastikan bahwa tiap user sudah mendapatkan kuesioner untuk menyalurkan pendapatnya mengenai template yang telah digunakan.



Gambar 5. Sharing kuesioner dilakukan dengan QR Code (lampiran 3) dan web link.

c) **Evaluasi**

Tahapan kegiatan ini sebagai tahap akhir, dimana outputnya berupa testimoni user template. Pada kesempatan ini, user dan asisten perisalah legislatif, serta perisalah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan mengenai template.

2. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Terdapat tiga nilai dasar ASN yang terkait dengan tahapan kegiatan sosialisasi penggunaan template yaitu:

a) **Akuntabilitas**

Pada kegiatan evaluasi mengedepankan nilai profesional dalam pencapaian tujuan efisiensi kerja.

b) **Etika Publik**

Penerapan nilai etika publik seperti menjalin komunikasi yang baik saat evaluasi penggunaan template yang berdaya guna untuk memastikan template sudah applicable untuk peningkatan kinerja asisten perisalah dan perisalah di bagian risalah. Melakukan evaluasi merupakan salah satu bentuk perwujudan dari etika publik, dimana penulis dalam melakukan tugas jabatan sebagai

perisalah tidak luput dari kegiatan berkoordinasi dan bekerjasama dengan pegawai lain di Bagian Risalah. Ini merupakan salah satu bentuk komunikasi publik yang harus dimiliki oleh ASN. Sebagai bentuk pelayanan, seorang ASN harus memiliki sopan santun saat mengemukakan opini dan menghargai komunikasi untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi perbaikan risalah rapat sementara

c) **Komitmen mutu**

Kegiatan evaluasi menerapkan nilai diskusi dan musyawarah yang dinamis untuk selalu dapat memperbaiki produk dalam hal ini template sesuai kebutuhan user terutama untuk update data untuk nama anggota dewan saat satu periode berlalu.

3. Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan sosialisasi, yaitu:

a) **Akuntabel**

Nilai akuntabel diterapkan pada kegiatan evaluasi yang merupakan suatu upaya bagi asisten perisalah legislatif dalam melaksanakan pertanggungjawaban terhadap tugas jabatan mengenai penggerjaan transkrip untuk meningkatkan efektifitas kerja. Sosialisasi dan evaluasi mencerminkan nilai dasar akuntabel karena setelah membuat template dan melaukan uji coba, maka template tersebut harus disosialisasikan dan dievaluasi kepada stakeholder yang terkait baik internal atau eksternal.

b) **Profesional**

Dengan adanya evaluasi diperlukan juga koordinasi dan konsultasi dengan mentor maupun pegawai di bagian risalah khususnya asisten perisalah dan perisalah. Hal ini menggambarkan suatu upaya untuk bekerja sesuai dengan kompetensi karena dengan melakukan evaluasi akan membantu asisten perisalah dan perisalah khususnya Bagian Risalah itu sendiri dalam memberikan suatu perolehan kinerja yang sesuai

dengan waktu yang telah dikeluarkan untuk mengerjakan suatu transkrip.

c) Integritas

Pada tahap evaluasi diperlukan suatu nilai integritas yang menjadi dasar pembuatan evaluasi produk atau template. Integritas adalah antara hati, pikiran, dan lisan harus selaras jadi bila ada masukan dari user yang penyampaiannya menutamakan integritas akan sangat berarti dalam penyempurnaan fitur template.

C. TIME TABLE KEGIATAN

No	Kegiatan	September		Oktober				November	
		IV	I	II	III	IV	I	II	
1	Konsultasi Rancangan Aktualisasi								
2	Pembuatan Database Combo Box								
3	Pembuatan Template Transkrip dengan Fitur Combo Box								
4	Komparasi dan analisa hasil transkrip tanpa template dan dengan template								
5	Evaluasi								

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi

D. STAKEHOLDER

Pihak yang terlibat dalam aktualisasi adalah dalam lingkup **internal**. Pegawai Bagian Risalah yang berkaitan langsung dalam proses pembuatan transkrip dan risalah rapat seperti asisten perisalah legislatif saat kegiatan transkrip. Kemudian juga terhadap perisalah legislatif saat proses editing dari transkrip menjadi risalah sementara yang kemudian diolah lagi menjadi risalah rapat resmi.

E. KENDALA

Perlu waktu khusus untuk dilakukan penjelasan detil atau demo kepada seluruh pegawai risalah karena pelaksanaan aktualisasi ini berbasis digital dimana pengoperasiannya masih kurang familiar dengan user. Selain itu juga perlu pembagian waktu yang baik antara mengerjakan aktualisasi dan tugas kantor sehari-hari.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pemecahan masalah isu yang dipilih "Belum Dimanfaatkannya Template Combo Box dalam Penyusunan Transkrip Rapat" yaitu penyusunan transkrip dengan menggunakan template transkrip combo box, meliputi database dan lembar transkrip dalam satu file yang terintegrasi sehingga mempermudah dalam penggerjaan transkrip dan lebih efisien dalam penggerjaannya. hal tersebut berkaitan dengan peran dan kedudukan ASN yaitu Whole of Government dan Pelayanan Publik dimana akses informasi terbuka untuk ASN mencari nama anggota dewan demi terciptanya pelayanan publik yang maksimal.

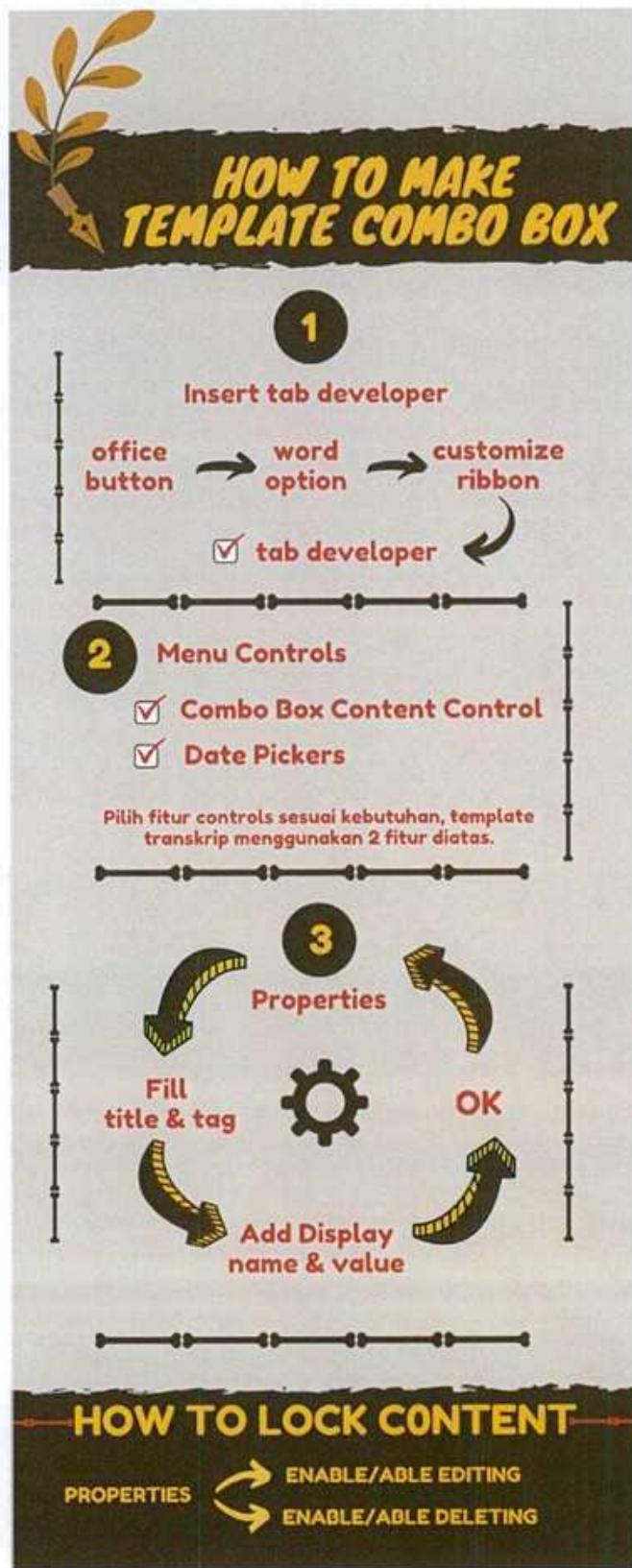
Sebagai perbandingan, penulis juga melakukan komparasi penggerjaan transkrip yang sangat berkaitan dengan peran dan kedudukan ASN dalam *Whole of Government* dengan basis koordinasi antara asisten perisalah satu dengan lainnya atau dengan perisalah pada satu bagian internal untuk menjadi *user*. Untuk dapat diimplementasikan dengan baik perlu dilakukan sosialisasi penggunaan template. Hal ini berkaitan dengan peran dan kedudukan ASN dalam *Whole of Government* untuk berkoordinasi dan berinteraksi langsung untuk penguatan kompetensi di bagian risalah. Penulis juga melakukan evaluasi template transkrip yang sangat berkaitan dengan peran dan kedudukan ASN yaitu *Whole of Government* dan pelayanan publik. Dalam hal ini evaluasi sebagai bahan dasar penyempurnaan template sehingga diperlukan koordinasi antara user dan penulis untuk dapat mendukung pelayanan publik yang maksimal.

B. SARAN

Terkait dengan pelaksanaan aktualisasi penyusunan transkrip dengan menggunakan template combo box, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan, diantaranya untuk **Internal** unit kerja, diharapkan ke depannya output dari kegiatan ini dapat diterapkan pada internal unit kerja untuk membantu mempercepat pekerjaan asisten perisalah legislatif dalam melakukan

penggeraan transkrip rapat dan tentunya dengan penerapan ini maka akan segera dihasilkan risalah rapat sementara yang berkualitas.

V. LAMPIRAN



Infografis cara membuat template
transkrip combo box



Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi



QR Code kuesioner sosialisasi aktualisasi

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN.....
TAHUN 2019

Nama : Michel Ike Permatassan, A.Md.Sc Nama Mentor: Dra. Tri Budi Utami, M.Si
Instansi : Setjen & BKD DPR RI
NIP. : 199511272019032002

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Mentor*
1	1 Okt 2019	Penyampaikan tahap pertama & kesiapannya	diskusi langsung	untuk disampaikan pada th ke 2.	<i>[Signature]</i>
2	9 Okt 2019	Persiapan template combo box.	diskusi langsung	Menyelesaikan template per APP	<i>[Signature]</i>
3	21 Okt 2019	Mengoreksi laporan pelatihan dan affiliation	diskusi langsung	Menyelesaikan laporan pelatihan	<i>[Signature]</i>
4	8 Nov 2019	Koordinasi laporan Sungkat dan laporan	diskusi langsung	Urg	<i>[Signature]</i>
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14	Dst ..				

(*) Pembimbingan yang sah
adalah pembimbingan yang
ditandatangani oleh Mentor

Lampiran 3. Kartu Kendali Pembimbingan Aktualisasi Bagi Peserta, Coach dan Mentor

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

PESERTA

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN.....
TAHUN 2019

Nama : MICHEL KE PERMATASARI Nama Coach : SULASI RONGIYAIT, SH, MH.
Instansi : SETJEN & BK DPR RI
NIP. : 199511272019032002

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach*
1	11 Oktober 2019	Menyampaikan hasil tlp kognitif I	diskusi langsung	Untuk Blangko ke tlp selanjutnya.	<i>✓ Ruy</i>
2	31 Oktober 2019	Menyampaikan e-kelola dan hasil template	diskusi langsung	menyampaikan hasil tlp AFQ	<i>✓ Ruy</i>
3	05 November 2019	Menyampaikan kendala bersosial terbatas pdlsarana langsung	diskusi langsung	Coach akan berdiskusi langsung dg mentor.	<i>✓ Ruy</i>
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12	Dst..				

(*) Pembimbingan yang sah adalah pembimbingan yang ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI

Rusmanto, SH., MH

TRANSKRIP TANPA TEMPLATE

KASET 5

KONSINYERING KOPO DENGAN KEMENTERIAN ATR/BPN, KEMENDAGRI, KEMENTERIAN PUPR, DLL.

KAMIS 29 AGUSTUS 2019.
MS. TAHUN SIDANG 2019-2020

F-PKS (DR. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng/WAKIL KETUA):

Kita menyatu padukan karena ini kan e RUU inisiatifnya kita. Secara umum kita tidak bisa membongkar-bongkarnya karena ada etika ini kanurusun kita mir, wan, Pak Dadang ini urusan kita. ... masa kita bongkar-bongkar pemerintah dengan DIMnyamonggo tapi waktu Pak Sekjen minta segera di kemarin kami ketemu dengan Mahkamah Agung ya. Kan akhirnya udah bilang ya, bahwa kita nggak ada masalah yang penting kalau saya jadi apapun modifikasi silakan. Yang penting jadi dulu karena kalau udah nggak jadi, masuk periode berikutnya bisa jadi nggak selesai-selesai.

Yang kedua ini terkait dengan mungkin di tahap yang lebih detail, drafting-drafting juga e perlu waktu. Kalaulahdibolehkan... kita mungkin sudah bisa membuatnya tim sinkronisasi yang e bisa melakukan ini sehingga pekerjaan kita bisa menjadi lebih cepat. Keputusan politiknya cepat, tetapi e draftingnya saya ingat rancangan undang-undang 7 2017 ya. Itu ada *disaster*, Undang-Undang pemilu itu nih mas Sirmadji, kang mas Sirmadjitanggungjawab Undang-Undang 7 2017. Tadinya pikirannya semuanya mau dite dari TPS mau langsung ke kabupaten kota gitu lho. Tidak ke kecamatan, karena itu di kecamatan e petugas PPK cuma 3. Ternyata keputusannya kabupaten kota nggak mungkin jatuh di kecamatan tapi kita nggak sempetngubah pasal 3.

Akhirnya bisa disiasati dengan keputusan KPU, tapi sebetulnya e itu cacat prosedur atau cacat konten. Nah biar itu tidak terjadi, ini babnya kita mengakomodasi kepentingan politik. Pasti ada banyak nih pak sekjen. Makanya drafting-draftingnyatemen-temen harus segera menyiapkan tim teknokrasi dari kita di panja ataupun di kementerian sehingga kita tidak ada kesalahannya. Apalagi peluang yudisial reviewnya sudah siap-siap juga gitu, sehingga kalau kita kontennya rapi, draftingnya rapi, saya yakin *product* ini akan bagus gitu pak. Terimakasih.

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terimakasih Pak Sirmadji Ali Sera, eh Pak Sirmadji Ali Sera (tertawa) Pak Mardani Ali Sera. Lihat Pak Sirmadji, dan saya kira ini masukan tentu ini juga kita perkuat karena selama ini jalan. Keputusan hari ini langsung keluar tudraftnya hari ini, jadi saya juga terimakasih keseriusan di pemerintah ya. Keseriusan di pemerintah luar biasa, baru kali ini Undang-Undang mendapatkan perhatian. Undang-Undang teknik ya, Undang-Undang teknis ya yang mendapatkan perhatian khusus dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri. Bahkan tadi rapat tadi yang dipimpin oleh wapres, berapa menteri sampai menteri keuangan juga hadir disitu nanti aja laporannya.

Baik saya kira, pandangan dan masukannya terimakasih. Kemudian respon dari seluruh anggota komisi II juga terimakasih. Pemerintah

terimakasih, untuk mengakhiri kami persilakan dari ya dari persaki dan ya ada ada masukan ada tanggapan sedikit ya, Pak Iwan mau nanggapi sedikit silakan. Waktunya tinggal 4 menit ya.

KOMUNITAS RIMBAWAN NUSANTARA (BAMBANG SUPRIYANTO):

Makasih bapak pimpinan.

Yang kami hormati anggota dewan.

Yang kami hormati kawan-kawan dari kementerian.

Terimakasih kami diberi kesempatan untuk hadir menyampaikan dukungan terhadap rencana yang secara pokoknya adalah saya masih menyebutnya *singlelandadministrationsystem*. Bawa hari ini berubah menjadi sistem informasi pertanahan, saya kira substansinya sama lah.

Nah, ada 1 database tentang tanah di bumi nusantara ini yang terdata di BPN, dan kalau tadi disampaikan pak ... tentang pro kontra itu nampak merisaukan sebenarnya kan bapak bapak juga menyampaikan bahwa baru RUU inilah yang presiden sama wapres juga betul-betul *concern*. Kami membacanya dari publik, oleh karena itu kami di kolom tadi ya kamilah yang ikut *men-support* yang RI 1, RI 2, bapak masa yang *support*. Yang tidak *support* memang awalnya itu yang kita baca, kami baca juga surat-surat dari menteri kepada menko tentang keberatan, tentang harus periode berikutnya. Itu kami menyebutnya itu yang tidak mendukung lah. Jadi kalau kalimat pro kontra kurang baik saya kira kami mohon maaf, tapi intinya kami di kolom yang pro itu tadi (tertawa) jadi mohon maaf kalau itu tidak pas di hadapan yang mulia kami mohon maaf. Tapi intinya, atas pembentukan *singlelandadministrationsystem* itu kami *men-support* dan bahasa umum sebagai saya juga *legal drafter* pak. Kalau ada hal-hal yang kontra interminis di dalam pasal-pasal yang menyangkut kewenangan yang ada di Undang-Undang lain itu harus ditiadakan. Hanya itu saja sebenarnya, sepanjang itu tidak mengganggu kewenangan lain di dalam Undang-Undang tentu tidak ada masalah, dan intinya ini merupakan 1 database. Jadi harus disupport bahwa kepemimpinan bapak Jokowi yang memang punya latar belakang yang luar biasa tidak e tidak seperti pemimpin-pemimpin yang terdahulu ini.

Ini sungguh luar biasa makanya kita harus menjadikan di periode ini, e database yang 1 di BPN. Nah terkait yang tadi bapak-bapak sampaikan, dewan yang terhormat tentang kawasan hutan, mungkin suatu saat sajalah saya diundang untuk menjelaskan tentang konflik, klaim kawasan, sengketa itu dalam momen yang lain. Termasuk bagaimana solusinya, kalau sekarang kami men-*support* tentang *singlelandadministrationsystem*.

Saya kira itu pak, terimakasih.

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwararakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Iwan dulu, pak Iwan silakan pak Iwan. Masa ketua persakinya nggak ada bicara sedikitpun.

KETUA PERSAKI (IWAN):

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwararakatuh.

Terimakasih. Jadi sebenarnya, tadi apa yang disampaikan pak Bambang itu betul sekali pak. Sebenarnya pro kontra itu itu adalah pada saat pembahasan di awal pak. Kemudian tadi saya sampaikan juga untuk meng-

hide mulai pada saat kita ... ditampilkan, tapi ternyata sudah tersebar kepada bapak mohon maaf sekali kalau itu tidak membuat membuat menjadi ketidaknyamanan pada bapak. Jadi intinya itu adalah itu.

Kemudian yang kedua, inti dari ini adalah kami mendukung sekali e sistem informasi pertanahan pak karena saya melihatnya juga saya pelaku usaha pak, bapak-bapak. Pelaku usaha dan saya juga sangat merasakan pak bagaimana saya sendiri kerja di kehutanan aja juga merasakan sekali karena saya pelaku bukannya di kementeriannya. Saya dari swastanya, bagaimana sulitnya untuk men mencoba menyelesaikan penggunaan pemanfaatan lain ataupun peruntukkan lain di dalam kawasan hutan. Kita juga punya kebun, juga di dalam kawasan hutan juga permasalahannya. Jadi memang masalahnya banyak pak, kita akan coba coba insyaAllah kita bisa selesaikan ya nanti kita akan koordinasi dengan teman-teman bagaimana apakah ini nanti akan kita tingkatkan ke dalam. Bukan kita tingkatkan, kita bawa ke dalam beberapa diskusi supaya nanti teman-teman dari kementerian terutama itu bisa mengerti posisinya sistem pertanahan itu seperti apa. Itu yang paling penting, sehingga tidak menjadikan bias saya rasa itu lebih utama.

Terimakasih. Assalamu'alaikumwarahmatullahiwarakatuh..

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam, saya kira e kita batasi waktu dan Pak Sekjen kita kan rencana kan ada acara ATRgoestocampus di UGM ini juga Pak Iwan UGM ya, pak Bambang UGM, Pak Cipta IPB, pak Petrus UGM, pak IPB, pak IPB juga, pak Agung UGM nah ini UGM dan IPB udah selesai. Nanti tolong di (tertawa kecil) libatkan di sesinya pak ini ni Pak Andik, Pak Andik ya. Tolong ya diundang ya, tanggal berapa itu ada goestocampus pas kita nanti kunjungan kerja ke ke Jogja, ya. Senin, senin, ya senin. Senin atau selasa lah itu ya. Ya pokoknya tolong nantitemen-temen dilibatkan ini untuk memperkuat posisi bahwa kita tidak ada *interest* apapun dengan ini dan para cendekia yang tergabung dalam persaki, itu kan persatuan sarjana kehutanan jelas itu. Bisa mengalahkan pendapat-pendapat yang tanpa dasar, ini ini kita berikan apresiasi lah kepada teman-teman ini ya. (tepuk tangan)

Baik saya skor waktu 2 menit untuk bersalaman lah, sambil kemas-kemas kita akan melanjutkan terhadap progress pemerintah terkait pembahasan Undang-Undang ini. Saya skor waktu 2 menit. Terimakasih Pak Bambang, Pak Iwan.

(RAPAT DISKORS 17.30 WIB)

KETUA RAPAT:

Pak, saya kasih bahan coba telaah mana yang kira-kira ini dianggap bermasalah ternyata dalam pemikiran akal sehat mereka, nggak ada masalah. Cuman ada beberapa masukan itu bagus kangitu. Skor saya nyatakan dicabut.

(SKORS DICABUT 17.33 WIB)

Mana para dirjen lain pak (tertawa) untuk map terkait dengan pembentukan peradil pengadilan pertanahan, pak sekjen jangan berkomentar dulu tentang poin itu. Biarkan nanti pak Sareh dulu yang berkomentar, ya. Ya pak Sareh ya. Jadi khusus dengan pengadilan pertanahan, pemerintah kan tidak membahas itu di tingkat pemerintah. Hanya kami mengadakan konsultasi kemarin dengan Mahkamah Agung sehingga kami sudah tahu hasilnya apa dan nanti Pak Sareh usulannya seperti apa karena kami kemarin berikan

tanggung jawab Pak Sareh untuk berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Pokoknya kalau ada aneh-aneh nanti itu urusan Pak Sareh dengan Mahkamah Agung. Khusus untuk pengadilan pertanahan.

Baik kami persilakan pak Sekjen untuk menyampaikan progress terkait dengan yang dari Menko Perekonomian mana ya? Ada? Ada ya? Dari menko perekonomian. (e hanya ingin mengamat saja) oh pengamat ya, intelejen, intelejen. Untuk mencatat supaya tidak menyimpang dari hasil keputusan. Silakan (tertawa) silakan pak sekjen untuk menyampaikan progress dan saya kira ya intelejenintelejen... silakan pak.

SEKJEN ATR/BPN (HIMAWAN ARIEF SUGOTO):

Terimakasih pimpinan.

Yang kami hormati e pimpinan komisi II dan juga ketua panja RUU pertanahan DPR RI, dan

Bapak dan Ibu para anggota komisi II panja RUU pertanahan DPR RI yang kami hormati.

Rekan-rekan e apes dan juga e para e narasumber yang hadir.

Melaporkan dari perkembangan memang terjadi dinamika diskusi di lintas kementerian yang sampai e mungkin cukup panjang dinamikanya. Bahkan sempat dibawa dalam e rapat terbatas yang dipimpin oleh bapak presiden kurang lebih mungkin 3 minggu yang lalu. Lalu dilanjutkan dengan 2 kali rapat dengan wakil presiden dan disela-sela itu juga rapat maraton selama terusan 1 minggu ini hampir setiap hari di kantor Menko. Dengan mungkin lebih dari 12 kementerian dan lembaga yang hadir. Sehingga baru tadi pagi sampai de mulai jam 10 sampai dengan jam 1 an lewat telah dibuat ataupun disepakati e usulan mengenai e perbaikan. Yang nanti secara formal akan kami sampaikan ke pimpinan dimana hal tersebut menimbulkan e terkait mengenai hal-hal yang dianggap e memasuki kewenangan lain dan juga berbenturan dengan Undang-Undang yang lain.

Serta masukan-masukan dari K/L lain dalam rangka agar Undang-Undang ini memang bisa berjalan tanpa e ada e presepsi ataupun pemikiran yang menganggap seolah-olah kementerian satu kementerian menjadi *super body*. Tetapi spiritnya, tetep e apa yang telah dibuat dan disusun dimana kita menuju suatu sistem yang lebih baik tetep dipertahankan dan itu disetujui sampai dengan level tadi wakil presiden. Walaupun terminologi istilahnya agak sedikit berbeda, yang mana dulu kita dorong dengan *nama singleland ... system* namun saat ini agak sedikit berubah namanya sistem informasi pertanahan kawasan dan wilayah terpadu. Yang mana sistem tersebut merupakan konsolidasi dari semua sektor yang dihimpun tentang batas-batas, batas hak, batas kawasan, batas pesisir, batas ijin batas administrasi dari bebagai sektor. Yang dalam waktu 1 tahun harus diselesaikan dan di-upload ke dalam sistem geoKKP kita yang nantinya menjadi sebuah sistem yang terpadu di kementerian ATR BPN. Jadi kedepan mungkin dengan Undang-Undang ini akan masa depan mengenai kejelasan dan juga kepastian mengenai batas-batas akan semakin terang dan sehingga apa yang dengan ide awal menuju *singleland administration system* mungkin akan terwujud. Walaupun mungkin banyak PR, begitu kemarin kita tawarkan 5 tahun akhirnya wah ternyata mereka sendiri yang tidak siap jadi kita beri waktu bertahap.

Nah yang kedua juga ada beberapa dinamika perbaikan perbaikan terkait ada di pasal 3 mengenai kewenangan ada di pendaftaran, ada di e

bahkan ada di sampai kepada menimbang. Mulai dari menimbang ketentuan umum sedikit, e cukup **alot** karena terminologi sektor juga cukup tinggi yang mana mungkin khawatir terhadap sektornya menjadi terdistorsi. Yang kedua juga adalah aspek lain dalam hal pengaturan ruang atas dan ruang bawah yang dikhawatirkan tentunya dengan ini seolah ada pembagian atau pendaftaran yang nantinya **dilekat ke atasan** maka ketentuan Undang-Undang lain tidak bisa diberlakukan dan disini mungkin karena di kita masih harus semuanya tertulis sehingga kita masukkan beberapa.

Lalu juga ada beberapa hal yang kita dorong seperti beberapa inisiatif e ada yang e bentuknya lain, ada juga yang e bentuknya lain. Ada juga yang mungkin diminta untuk e di drop, dan ada yang diminta dirubah. Tetapi kami nanti kembalikan kepada pimpinan dan panja e bapak dan ibu panja DPR RI mengomentari usulan dari hasil yang telah e dibahas oleh bapak wakil presiden dan apabila nanti dalam pembahasan masih ada planning bahwa menteri akan melaporkan kepada bapak presiden terkait hal tersebut.

Jadi itu sebenarnya dari apa yang ada dan perlu dilaporkan total dari diskusi yang cukup panjang hampir 3 minggu ini dengan pemerintah menghasilkan menjadi usulannya 16 bab dan 103 pasal dan jika diijinkan kami akan menjelaskan dokumen ini dan tentunya mekanisme pembahasannya kami serahkan kepada pimpinan panja DPR RI. Demikian, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam, silakan diserahkan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembahasan dan tentu nanti kami juga akan melaporkan kepada komisi, pada waktu panja menyelesaikan tugasnya dan menyampaikan kepada komisi. **Poto-poto** (tepuk tangan) baik dokumen ini akan kita bahas nanti malem, tentang tata cara pembahasan nanti kita sepakati setelah kita sama-sama makan nasi kebuli sajian malam ini. Nasi kebuli, nasi kebuli ya betul ya, bukan nasi mande (tertawa kecil) sama duren, sama sate kadir (tertawa) baik seperti yang saya sampaikan di awal terkait dengan apa yang telah disampaikan pada rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung kalau kami dalam sebetulnya mereka tidak setuju dengan hakim *ad hoc* sebetulnya itu dan kalau kewenangan yang sekarang diatur didalam Undang-Undang peradilan kemudian diatur dalam Undang-Undang pertanahan itu pun kelihatannya keberatan. Tapi kalau diintegrasikan kedalam sistem yang sekarang berlaku di Mahkamah Agung rasa-rasanya menurut saya ini juga tidak ada masalah. Dan hak pembuat Undang-Undang itu kan antara DPR dan pemerintah.

Pada waktu mengkritisi bahwa ada dalam Undang-Undang kehutanan, saya juga pimpinan panja cuman saya nggak mengomentari karena konteksnya bukan disitu. Saya diam dan sebetulnya bagus juga kalau ada pengadilan khusus di bidang kehutanan terkait dengan kerusakan dan pembalakan liar sebetulnya. Cuman saya tidak mengerti juga kok tidak dibentuk-bentuk ternyata kemarin muncul alasan itu. Oleh karena itu saya kira sebagai penasihat hukum di Komisi II pak Sareh bisa mendalamai hati, hati hatinya para hakim agung yang mulia itu. Silakan pak Sareh, dan ini nanti saya minta Pak Sareh nanti dikomunikasikan ya dengan Mahkamah Agung ya silakan,

SAREH WIYONO:

Penjelasan itu lebih lengkap (sekarang pak, sekarang aja sedikit umum aja nanti substansi kita masukkan nanti malam akan ketemu tu dengan pasal itu silakan).

Baik pak jadi mengenai masalah Undang-Undang e peradilan pertanahan pada prinsipnya memang Mahkamah Agung keberatan. Namun demikian bahwa sebetulnya tidak keberatan pak tetapi hanya meminta supaya peradilan dipisahkan dengan RUU pertanahan ini. Hanya minta dipisahkan aja. Sehingga, pembentukannya setelahnya RUU pertanahan ini selesai... tidak bisa tidak perlu digabungkan. Garis besarnya begitulah, kalau memang toh RUU ini memang tanggal 24 harus diketokgitu. Kalau digabungkan nggak akan selesai Undang-Undang ini gitu pak garis besarnya.

KETUA RAPAT:

Nanti kita masuk kedalam substansi ya nanti malem ya, karena kita akan runut aturan nanti pembahasan nanti malam, karena kita sudah menyelesaikan sampai bab 5 terakhir kita menyelesaikan bab 5 meski banyak perubahan antara bab 1 sampai bab 5. Kita akan memulai bab 6 dulu pak, bab 6 dulu termasuk bagaimana pembicaraan di pemerintah dan kita juga akan ketemu dengan pasal terkait dengan penanganan sengketa dan pengadilan pertanahan. Sehingga nanti coba kita runut selesaikan dulu baru nanti kembali lagi ke bab 1 sampai ke bab 5 terkait dengan hasil dari sinkronisasi di tingkat pemerintah jadi kita coba lakukan secara sistematis karena kita menjelang sholatmaghrib saya kira kita skors waktu nanti kembali jam 7 didahului makan malam dan saya minta supaya pembahasan ini kita bisa selesaikan betul sampai tuntas di tingkat panja kanbosen juga ya rapat panja lagi rapat panja lagi gitu ya. Kalau ada hal-hal yang tentu 1 2 3 pasal yang di panja masih kurang kurang matang kita bisa matangkan nanti di komisi. Karena kalau sudah di tingkat komisi dimatangkan di tingkat komisi kita bisa nanti menuju di tingkat pengambilan keputusan tingkat 1 dalam rapat kerja dengan menteri yang diutus oleh presiden. Saya kira demikian kita bertemu jam 7, sholatmaghrib kemudian sholat isya makan bersama disini, setengah 8 lah kita sudah bisa mulai rapat kembali masuk di substansi dari bab 5 sampai ke bab 15. Halamannya kalau dari draft lama itu hanya sekitar tersisa tinggal 29 atau tinggal 30 halaman. Lebih sedikit dari yang pernah kita bahas bab 1 sampai bab 5 apalagi kalau kemudian sudah ada singkronisasi karena banyak bab dibuang dari 157 tinggal 103 pasal. Jadi saya kira lebih simple. Terimakasih, sampai ketemu skor saya nyatakan sampai jam 19.00.

(RAPAT DISKORS 17.46 WIB)

TRANSKRIP DENGAN TEMPLATE COMBO BOX



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KONSINYERING
Senin, 26 Agustus 2019**

SIDE A & B

**TRANSKRIPTOR:
APL - Titiek Endartini, S.A.P
30/08/19**

KETUA RAPAT (Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA/ F-PKB):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua
Selamat malam.

Yang saya hormati Saudara Sekjen KPU RI beserta jajarannya,
Saudara Sekjen Bawaslu RI beserta jajarannya,
Anggota Komisi II yang saya hormati.

Malam ini kita akan melakukan Rapat Dengar Pendapat, Konsinyering, untuk membahas tentang RAPBN Tahun 2020. Dan dengan bacaan *Bismillahirrahmanirrahim*, rapat ini kami buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.50 WIB)

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Selanjutnya berturut-turut saya akan minta dari KPU dulu, lalu Bawaslu untuk menyampaikan presentasi. Selanjutnya akan di, dari anggota Komisi II untuk memberikan tanggapan.

Silakan Pak Arif.

KPU/SEKJEN (ARIF RAHMAN HAKIM):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi II DPR RI beserta Bapak-Ibu anggota Komisi II DPR RI,

Yang kami hormati rekan sejawat kami, Sekjen Bawaslu beserta jajaran.

Sebelum kami menyampaikan paparan, kami ingin mengenalkan Tim dari KPU terlebih dahulu, supaya mengenal para kepala biro di KPU. Jadi di sebelah kanan saya Pak Purwoto, Kepala Biro Logistik. Yang paling ujung, Pak Nanang Supriyatna, Kepala Biro Keuangan. Yang di belakang, Kepala Biro Tekmas, Ibu Nursarifah, Pak Adi Wijaya, Inspektur, Ibu Yayuk, Kepala Biro Umum, Pak Wagian, Wakil Kepala Biro Perencanaan, Pak Luki Kepala Biro STM KPU dan Pak Supriyatna, Wakil Kepala Biro Tekmas. Lengkap.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Komisi II beserta anggota, yang selalu mendukung KPU, sehingga KPU mendapatkan kemudahan pada saat mengajukan usulan penambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal yang terkait disana, Dirjen Anggaran, terutama. Kami akan menyampaikan, yang pertama mengenai realisasi anggaran KPU, kemudian anggaran KPU Tahun 2020 dan juga program prioritas KPU, kemudian kebutuhan anggaran KPU yang masih belum terpenuhi untuk Tahun 2020 serta permohonan pergeseran anggaran untuk alokasi pagu anggaran yang sekarang ini agar lebih sesuai dengan kebutuhan KPU.

Realisasi anggaran KPU Tahun 2019, kami sudah memanfaatkan 82,78% dari anggaran yang diberikan kepada KPU di tahun 2019 sebesar Rp18.104.139.000.000,00, sudah direalisasikan Rp14,88 triliun. Pemanfaatan yang sebesar 82,78% ini sudah sesuai dengan target yang atau rencana kerja di KPU.

Kemudian pada 2019, kami berupaya memanfaatkan anggaran yang sudah diberikan di KPU, meskipun ada perubahan-perubahan tambahan-tambahan kegiatan, kami tidak meminta alokasi tambahan. Tetapi kami kemudian melakukan optimalisasi dengan cara merevisi anggaran yang sudah ada di KPU. Salah satu yang terakhir, kami diminta untuk memberikan santunan kepada personil kami di Badan Penyelenggaraan Ad hoc, itu juga kami tidak meminta tambahan dari Kementerian Keuangan, kami menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan di KPU.

Untuk tahun 2020, coba 2020, ya, KPU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2.159.511.595.000,00. Alokasi anggaran yang diberikan sekarang ini masih belum sesuai dengan usulan kami. Jadi KPU mengusulkan, untuk tahun 2020, anggaran yang kita butuhkan adalah sebesar Rp3.194.249.000.000,00. Itu usulan kami. Sehingga dibandingkan dengan usulan yang diusulkan oleh KPU, kami masih membutuhkan dukungan dari Komisi II untuk terus berupaya mengajukan kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp1,2 triliun. Ini juga tujuannya adalah untuk keseimbangan agar sarana dan prasarana KPU nanti bisa sejajar dengan apa yang direncanakan oleh Bawaslu, untuk meningkatkan sarana dan prasarana di tingkat kabupaten.

Karena KPU meskipun sudah permanen, namun sarana dan prasarana KPU ditingkat kabupaten juga 60% masih pinjam pakai dengan kondisi yang tidak terlalu memenuhi syarat kesehatan kerja.

Alokasi yang ada sekarang sebesar Rp2,159 triliun, berdasarkan belanja operasional dan belanja non operasional, alokasinya adalah untuk belanja operasional sebesar Rp1,765 triliun dan untuk belanja non operasional sebesar Rp394,249 eh Rp390,249 miliar.

Tahun 2020, KPU akan melakukan program-program prioritas, antara lain yang pertama adalah untuk melakukan kegiatan pemilihan serentak tahun 2020. Kemudian melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menitikberatkan pada pendidikan tata kelola pemilu. Jadi kami sudah memberikan beasiswa kepada para PNS di KPU, baik pusat, provinsi maupun kabupaten, untuk menempuh pendidikan S2 tentang kepemiluan yang tujuannya adalah untuk menyiapkan calon-calon pemimpin KPU ke depan, supaya mereka memahami, mendalami tentang kepemiluan. Jadi ada program S2 tata kelola pemilu.

Kemudian tahun 2020 kami juga membutuhkan biaya operasional terutama untuk gaji pegawai, karena ada penataan organisasi KPU, jadi ini terima kasih kepada ...di Komisi II yang sudah memperkuat jajaran sekretariat jenderal, sehingga pada tahun 2020 nanti di Sekretariat Jenderal KPU akan mendapatkan tambahan 3 Eselon IB. Dengan demikian diharapkan kinerjanya akan menjadi lebih baik, karena sekarang ini hanya ada 1 Eselon I di KPU dan juga di Bawaslu. Kemudian melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan kepada masyarakat.

Untuk tahun 2020 yang dengan alokasi yang sekarang ini, kami mengusulkan pergeseran anggaran agar alokasi yang sebesar Rp2,159 memenuhi lebih sesuai dengan kebutuhan KPU. Yang pertama untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, yang semula dialokasikan Rp1,886 triliun, kebutuhannya akan kami tambah sebesar Rp191 miliar, sehingga untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, alokasinya dari Rp1,886 triliun menjadi Rp2,078 triliun. Kemudian untuk program penguatan kelembagaan, demokrasi dan perbaikan politik lainnya, yang semula dialokasikan Rp106,634 miliar, karena kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan operasional kami, sehingga program penguatan kelembagaan dan proses demokrasi ini akan kami kurangi menjadi Rp81.407.400.000,00.

Rencana pemanfaatan anggaran 2020 apabila pagu alokasi anggaran nanti disetujui sebesar Rp3,1 triliun, rencananya nanti akan kami manfaatkan, yang pertama adalah untuk kegiatan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal, disini kegiatan utamanya adalah untuk pembayaran gaji dan uang kehormatan sehingga cukup besar ini kebutuhannya. Karena di pusat, provinsi, dan kabupaten, jumlah personil kami sekitar 12 ribu personil.

Kemudian untuk pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu sebesar Rp23,540 miliar. Untuk pelaksanaan manajemen perencanaan dan data sebesar Rp179,718 miliar. Untuk pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian Rp90,756 miliar. Penyelenggaraan operasional dan

pemeliharaan perkantoran terutama adalah untuk operasional kantor dan kendaraan operasional di 549 satker, pembangunan gedung kantor KPU di 22 satker dan juga untuk sewa gedung dan gudang di KPU provinsi dan kabupaten/kota. Jumlahnya untuk penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor Rp1,126 triliun.

Peruntukan berikutnya untuk pemeriksaan di Sekretariat Jenderal KPU, dan alokasi untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik sebesar Rp193,843 miliar antara lain akan digunakan untuk penyiapan penyusunan rancangan Peraturan KPU dalam menghadapi pilkada serentak, ini utamanya. Untuk fasilitasi pelaksanaan tahapan pilkada untuk pendidikan pemilih dan untuk sosialisasi serta partisipasi masyarakat serta untuk administrasi PAW. Dari alokasi sebesar Rp3,1 triliun, nanti akan kami distribusikan ke KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dengan rincian seperti, dapat dilihat di tabel 9, mengenai pembagian tugas-tugas untuk KPU RI, provinsi dan kabupaten/kota.

Kemudian yang terakhir, kami mohon dukungan dari Pimpinan Komisi II DPR RI beserta Bapak-Ibu anggota Komisi II, yang pertama adalah untuk penambahan usulan pagu alokasi tahun 2020, sebesar Rp1.034.738.000.000,00. KPU juga meminta persetujuan dan dukungan, untuk pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pergeseran anggaran yang sekarang sudah dialokasikan di pagu anggaran, seperti yang kami sampaikan di tabel 11.

Demikian Pimpinan dan Bapak-Ibu angota Komisi II yang kami usulkan. Dan mohon dukungan dari Bapak-Ibu. Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Arif. Jadi yang diminta tambahnya Rp1,034 sekian triliun ya Pak ya.Terima kasih.

Selanjutnya saya berikan waktu kepada Sekjen Bawaslu.

Silakan Pak.

BAWASLU/SEKJEN (GUNAWAN SUSWANTORO):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian.

Shalom. Om swastiastu nama budaya.

Yang terhormat Ibu Pimpinan Komisi II,

Yang terhormat Ibu dan Bapak anggota Komis II DPR RI,

Yang saya hormati Sekjen KPU beserta seluruh Kepala Biro dan

jajarannya.

Izinkan saya mengajak kita sekalian untuk sekali lagi tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Ilahirobbi, yang telah memberikan rahmat, hidayah kepada kita sekalian sehingga Alhamdulillah kita bisa melaksanakan tugas-tugas negara sampai malam hari ini.

Sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekjen KPU, saya juga akan memperkenalkan pejabat di Bawaslu. Di samping kiri saya adalah Kepala Biro Administrasi, Pak Adi. Terus Kepala Biro TP3, ini yang terkait dengan teknis-teknis pengawasan dan penanganan pelanggaran serta sengketa, satu lagi kepala Biro HDPI belum sampai dan beberapa kepala bagian di belakang.

Perlu kami laporan bahwa selama ini Bawaslu itu, Eselon I, Eselon II, dan Eselon III itu jumlahnya Cuma 16 orang, selama ini Pak. Di pusat hanya 16 orang, tapi Alhamdulillah 16 orang kita mampu untuk mengendalikan seluruh Indonesia, Pak Dadang.

Selanjutnya ingin saya paparkan terkait dengan anggaran 2020. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa tema RKP 2020 adalah peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas. Dari 5 prioritas nasional, Bawaslu diarahkan untuk masuk ke prioritas ke-5, yaitu stabilitas Pemerintahan ... lanjut. Stabilitas pertahanan dan keamanan yang meliputi 5 hal yaitu penguatan regulasi, perbaikan peradilan perdata untuk kemudahan berusaha, tiga perbaikan peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restorative, keempat penguatan upaya antikorupsi. Dan kelima adalah penataan biaya politik. Disinilah diarahkan oleh Bappenas, bahwa Bawaslu masuk dalam penataan biaya politik.

Dari prioritas nasional dan RKP yang sudah kami paparkan, anggaran Bawaslu sesuai dengan pagu indikatif sejumlah Rp2.963.762.603.000,00 akan kita gunakan sesuai dengan perintah daripada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 68 serta PerBawaslu Nomor 15. Dalam rangka penguatan kelembagaan tersebut, Bawaslu akan ditambah 3 Eselon I juga, Eselon IB. Pertama adalah Deputi Administrasi, kedua adalah Deputi Teknis, dan ketiga adalah Inspektur Utama. Dari 3 eselon I tersebut tentunya di pusat akan menambah 3 biro menjadi 12 biro, sedangkan di provinsi dari eselon III, Kepala Sekretariat Eselon III menjadi Eselon II A.

Selanjutnya pagu anggaran 2020 sesuai dengan arah kebijakan Bawaslu di Tahun 2020 yaitu akan kita gunakan untuk pengembangan dan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif, kedua pengembangan kelembagaan Bawaslu, ketiga fasilitas sentra Gakumdu. Perlu kami laporan bahwa Gakumdu ini masih tetap ada di 2020 karena masih ada pilkada. Gakumdu akan berakhir di tahun 2020. Nanti 2021 sudah tidak ada karena seiring dengan tidak adanya pilkada. Keempat adalah pendidikan pengawasan partisipatif di pusat dan di 34 provinsi, kelima pembentukan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif di pusat dan di 15 daerah. Keenam, pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif di pusat dan di 4 daerah, ketujuh pengawasan penyelenggaraan pilkada 2020, kedelapan sosialisasi ditingkat kabupaten/kota terkait dengan pemutakhiran data pemilih di tingkat desa dan kelurahan. Kita akan membantu KPU dalam rangka tugas-tugas KPU, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Terus sepuluh itu bimbingan teknis bagi unsur pengawasan

terkait dengan pengawasan pilkada 2020.

Anggaran Rp2,96 triliun akan kita bagi ke dalam 2 program, yaitu program dukungan manajemen sejumlah Rp184 miliar. Kami mencoba untuk konsisten, anggaran untuk operasional atau dukungan manajemen itu jauh lebih kecil daripada anggaran untuk pengawasan. Sedangkan anggaran untuk pengawasan penyelenggaran pemilu, kami alokasikan sejumlah Rp2,77 triliun, sehingga total Rp2,963 triliun sekian.

Perlu kami laporan bahwa proyek prioritas nasional, pertama adalah pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu partisipatif, ini sudah ditetapkan oleh Bappenas. Adapun kegiatannya adalah sosialisasi ke masyarakat tentang teknis pengawasan penyelenggaraan pemilu, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Sedangkan prioritas nasional kedua yaitu pembangunan pusat pendidikan pengawasan ... hasil plotting yang kita alokasikan di Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, kepada peserta pemilu, kepada Panwas kecamatan, dan organisasi masyarakat sipil.

Distribusi anggaran sejumlah Rp2,9 triliun tersebut kita bagi dalam dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, sejumlah Rp184.075.278.000,00. Untuk teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu Rp84.096.350.000,00. Pengembangan produk hukum Litbang, pengelolaan kehumasan dan pengawasan internal, sejumlah Rp54.524.150.000,00. Sedangkan teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu provinsi dan lembaga pengawas pemilu adhoc itu sejumlah Rp2.641.066.825.000,00.

Output daripada masing-masing program tersebut, khusus untuk dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, output pertama adalah layanan perencanaan, kedua layanan sarana dan prasarana internal, ketiga layanan pemantauan dan evaluasi, keempat layanan manajemen sumber daya manusia, kelima layanan manajemen keuangan, keenam layanan manajemen BMN, ketujuh layanan umum, kedelapan layanan data dan informasi, kesembilan adalah layanan perkantoran. Sedangkan output untuk program teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu, pertama adalah sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada masyarakat, peserta dan penyelenggara pemilu. Kedua, teknis pengawasan pemilu, ketiga, penanganan pelanggaran, keempat penyelesaian sengketa, kelima pendidikan pengawasan partisipatif dan keenam, pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu partisipatif.

Output program pengembangan produk hukum Litbang Pengelolaan Kehumasan dan Pengawasan Internal, pertama adalah pembuatan peraturan Bawaslu, ketiga sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada media massa, ini dalam rangka kehumasan. Ketiga adalah perjanjian kerja sama dan koordinasi kelembagaan nasional dan internasional, keempat adalah pengembangan produk hukum, litbang, pengelolaan kehumasan dan pengawasan internal.

Sedangkan output yang akan kita alokasikan untuk teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu di Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, pertama adalah teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu provinsi dan kabupaten/kota, kedua pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan kehumasan ... di provinsi tersebut, yang ketiga adalah layanan perkantoran.

Untuk memenuhi kebutuhan di tahun 2020, kami masih mengusulkan, sekali lagi mengusulkan, karena kami Bawaslu untuk kabupaten/kota, kita masih melakukan sewa kendaraan. Jadi sewa kendaraan itu apa, untuk tahun 2020 itu belum teralokasikan, sehingga kami mengusulkan tambahan hanya khusus untuk pengadaan atau sewa kendaraan operasional roda empat di tingkat kabupaten sejumlah Rp349.920.650.000,00. Itulah gambaran kebutuhan anggaran di tahun 2020, baik yang ada di dalam pagu indikatif maupun usulan dalam rangka untuk pemenuhan sewa kendaraan roda empat di tingkat kabupaten.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jadi minta tambahannya Rp349 miliar saja Pak, untuk sewa saja ya Pak? Lebih baik sewa daripada pengadaan. Saya agak ini, karena di wilayah saya kemarin bermasalah semua, karena persoalan pengadaan, bukan sewa. Itu yang perlu harus kita hati-hati.

Terima kasih Pak.

Selanjutnya saya persilakan kepada anggota Komisi II untuk memberikan masukan maupun catatan-catatan terhadap penyampaian dari KPU dan Bawaslu.

Pak Dadang, silakan Pak Dadang.

F-P GOLKAR (Drs. H. DADANG S MUCHTAR):

Baik, terima kasih Ibu Ketua.

Sekjen dua-duanya bersama seluruh jajarannya.

Mungkin saya bersifat umum ya, tidak bersifat secara detail, saya yang pertama mengingatkan dulu ini. Duitnya banyak banget Mas, ... saya kelakar sama Pak ... lebih baik dari Sekjen KPU daripada Sekda provinsi. Kemudian Sekjen Bawaslu daripada Sekjen Mendagri. Benar itu. Dalam hal pengelolaan uang. Tadi kita baru saja rapat untuk menyetujui untuk sementara global, Depdagri saja Cuma Rp3,1 triliun itu Pak. Itu Departemen Dalam Negeri yang membawahi, mengomandoi, semuanya, Pemerintah Indonesia, di kabupaten/kota. Nah untuk itu saya minta, ini anggaran ini betul-betul digunakan secara efektif efisien untuk mencapai tujuan. Rapat evaluasi KPU dilaksanakan nanti setelah tanggal 1 kalau tidak salah. Ya Bu ya? Ada rapat evaluasi. Tapi saya ingin mengingatkan lagi ini, saya belum lihat gambaran, tadi sudah tercetus tapi di halaman berapa, tayangkan, upaya tentang mencegah korupsi. Coba, ada tidak. Tadi, Bawaslu atau KPU itu? Yang tadi

ada satu digunakan untuk ini, ini, ini, diantaranya adalah bagaimana memperkecil tindak upaya korupsi. Ini yang saya sampaikan kasuistisnya, ini saya saja sebagai ... , saya belum melihat, walaupun evaluasi, ini perilaku Panwas PPS dan Panwas kecamatan yang berani bermanipulasi penambahan perolehan suara, ini belum ada saya lihat itu, bagaimana upaya pembinaannya itu, untuk berapa miliar, berapa apa, untuk ini. Bukan korupsinya. Jadi itu terjadi diseluruh Indonesia. Dan itupun dilakukan oleh kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita yang jadi sekarang pun melakukan yang seperti itu, banyak. Untuk itu coba Bawaslu sama KPU coba jelaskan, tayangkan, ada tidak di dalam upaya pembinaan tadi, jajaran yang lebih banyak. Khususnya kejadian Panwas dengan ..., dengan KPPS. Yang tadi metode perhitungannya yang dihitung secara umum dari desa kita potong birokrasi ditarik langsung ke kecamatan, ternyata di kecamatan itu terjadi tindak ... di seluruh Indonesia. Jadi mohon maaf kalau ada kawan saya yang jadi lagi ... itu banyak, bukan saya men-judge ya.

Jadi untuk itu saya secara umum, ini sejauh mana ada suatu komitmen bersama. Saya acc saja anggaran, tapi dalam pilkada ini akan terjadi lagi penggembungan suara dari mereka, kalau tidak ad penekanan atau upaya tindakan pembinaan dari Komisioner KPU pusat maupun Bawaslu pusat. Ini terjadi Pak. Saya ada cerita kawan saya itu sudah jadi, sampai habis puluhan miliar, sama juga itu. Tentang permainan ini, puluhan miliar.

Jadi ini saja Bu, saya secara umum saja, tidak banyak ingin saya sampaikan. Tapi nanti secara evaluasi ... komisioner. Tapi Bapak sebagai staff pendukung, penunjang kinerja para komisioner, coba buatkan anggarannya untuk buat itu, bagaimana untuk mencegah itu. Atau sudah muncul belum disini ini? Saya lihat belum ada. Pencegahan ini terjadi Pak, ini jangan bohong, tidak bisa dipungkiri, ini terjadi, apalagi di dapil saya. Dan sejauh mana tindakannya itu, supaya nanti di 2022 di kampung halaman saya ada pilkada, tidak terjadi lagi. Sebenarnya embrio itu sudah ada terjadi pada KPU lama, zamannya si MA ini. Sudah terjadi itu. Tapi lebih domain sekarang dengan berani mengeluarkan uang ratusan juta. Dan tadi, memang gede itu operasionalnya. Sampai angka sekian triliun, karena personilnya yang banyak. .. Cuma 500 ribu, kerjanya setengah modar, kan begitu. Nah itulah peluang yang untuk menjadi dia bertindak melanggar komitmen. Kan Pak? Tolong Pak, saya tidak ikut sampai ini mungkin, tapi coba deh, salah satu tayangkan dulu deh, ada tidak itu upaya itu? Ada belum? Kalau ada, saya titipkan kegiatan itu, ambilkan dari anggaran sana. Sedangkan yang menyangkut pergeseran, Pak Arif, itu pergeseran yang 2020 sisanya atau yang pemilu kemarin? Oh menggeser saja? Selain yang kita ajukan, dialihkan ke tempat lain?

KPU/SEKJEN (ARIF RAHMAN HAKIM):

Ya, jadi karena alokasi.

F-P GOLKAR (Drs. H. DADANG S MUCHTAR)

Maaf ya Bu, diskusi.

KPU/SEKJEN (ARIF RAHMAN HAKIM):

Pimpinan,

Saya, alokasi yang sekarang, bagi KPU, kebutuhan operasionalnya masih terlalu kecil sekali, sehingga kami akan memenuhi dengan cara menggeser antar program. Meskipun ini belum ditetapkan, tapi ini menjadi modal kami pada saat membahas dengan Menteri Keuangan. Seandainya alokasinya tetap 2,1 maka proporsinya yang kita geser.

F-P GOLKAR (Drs. H. DADANG S MUCHTAR):

Baik, itu yang 2,1 itu untuk yang rutin, atau untuk pilkada yang serentak itu?

KPU/SEKJEN (ARIF RAHMAN HAKIM):

Ya ini sementara ya dua-duanya, baik rutin maupun pilkada.

F-P GOLKAR (Drs. H. DADANG S MUCHTAR):

Karena kan kembali ini, kalau dihitung total, pilkada serentak itu kan dialokasikan dari APBD. Nah kalau dihitung secara akumulatif, berapa triliun lagi itu kan? Secara 269, 260 atau 269?

KPU/SEKJEN (ARIF RAHMAN HAKIM):

Dua ratus tujuh puluh satker yang akan melaksanakan pilkada serentak.

F-P GOLKAR (Drs. H. DADANG S MUCHTAR):

Ya kalau tiap satker itu katakan sekarang Rp20 miliar, Rp30 miliar saja, banyak.

KPU/SEKJEN (ARIF RAHMAN HAKIM):

Ya, nanti saya

F-P GOLKAR (Drs. H. DADANG S MUCHTAR):

... artinya diefisienkan begitu.
Mungkin itu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dadang.

Ini Pak, saya luar biasa saya itu sangat menghargai anggota Komisi II. Kalau anggota komisi lain itu Pak, ketika sudah tidak, sudah masa akhir dan sudah tidak lanjut Pak, itu banyak yang tidak datang. Alhamdulillah ini kita harus kasih applause semua.

Ini yang hadir disini ini mungkin rapat terakhir dengan Bapak-Ibu semuanya ini. Jadi kita harus menghargai Beliau-beliau ini yang benar-benar memang berjuang untuk anggaran yang lebih baik lagi ke depannya, terutama untuk pilkada dan pemilu ke depannya.

Selanjutnya, Pak Sutriyono dulu baru Bu Sarwindah. Oh Bu Wendah? Apikan banget sih uwong iki.

Silakan Bu Sarwindah.

F-PAN (Dra. SITI SARWINDAH, M.Si.):

Terima kasih Pak Tri. Perpisahan ya Bu ya.

Amin. Memang rejekinya di PAW kok.

Ini saya ingin menyoroti masalah tadi, dari Bawaslu ya. Kita semua tahu, karena kita juga pelaku ya, pelaku di lapangan ya, bahwa Bawaslu ini dalam pilkada apalagi pileg, itu sangat-sangat berperan, terutama untuk mencegah manipulasi ataupun penambahan, pengurangan. Dan itu posisinya memang sangat strategis karena semua yang bertarung inginnya menang. Dan ambisi atau apa namanya ghiroh untuk menang ini, otomatis akan mencari jalannya yaitu mengajak kerja sama dengan pihak-pihak terutama yang mengawasi, dalam hal ini Bawaslu. Nah Bawaslu di daerah ini yang biasanya rawan itu diajak bekerja sama oleh pihak-pihak yang bertarung. Tadi saya kaitkan dengan penambahan Eselon I yang tadinya 1 bisa menjadi nambah menjadi 3 ya? Nah itu apakah ada korelasinya penambahan itu dengan pencegahan dari permainan di lapangan ya, permainan antara Panwas daerah dengan peserta pilkada yang akan datang ini? Nah itu korelasinya ada tidak, supaya bisa mencegah, jadi penambahan anggaran ini bisa mengacu kepada efektivitas dan efisiensi serta bagaimana ya, peraturan itu sebaik apapun kita rancang, sebaik apapun, idealismenya tinggi seperti apapun, kalau dalam pelaksanaannya itu manusianya, SDMnya ini tidak patuh pada aturan itu juga akhirnya tidak ada gunanya, begitu. Mohon diberi penjelasan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Sarwindah.

Pak Sutriyono? Selfinya nanti Pak.

F-PKS (SUTRIYONO, S.Pd., M.Si.):

Baik.

Pak Sekjen KPU dan Bawaslu yang saya hormati beserta pejabat Eselon I-nya tidak banyak ya, Bapak sendiri ya?

Ini semenjak undang-undang ini disahkan sampai sekarang ini sudah pemilu Pak, sudah sekian tahun, tapi belum ada realisasi yang memadai ya untuk itu ya. Karena kita temanya anggaran, jadi kita fokus anggaran. Tapi menurut saya beberapa, kalau nanti kita rapat dalam kesempatan yang lain, itu saya pikir implementasi dari Undang-undang Pemilu itu juga perlu dievaluasi, Pak. Karena itu juga akan menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan berjalannya. Bukan sekedar proses pemilu, tapi juga seluruh tahapan yang menyangkut dengan pemilu itu sendiri, begitu. Nah ini saya pertama ini Pak Arif, jadi kekurangan atau permintaan tambahan Rp1 triliun ini menurut saya tidak sederhana ini Pak. Nah persoalannya adalah kalau itu tidak tercapai ini, resikonya bagaimana? Itu satu. Dan di dalam yang Bapak berikan ini, Ibu Ketua, point 7 itu ya, dalam halaman 8 ini kan ada kebutuhan yang sifatnya itu wajib dialokasikan sebanyak satu muatan ya Pak Arif ya? Ya, makanya dari itu. Jadi saya kembali lagi Pak, karena kita ini Cuma 2 satker istilahnya ya, jadi dari Pak Arif maupun dari Pak Gunawan ini, kalau dari rencana permintaan tambahan yang sebanyak sekian total Rp1,9 triliun, ini kan menurut saya luar biasa Pak. Tadi kita rapat di sebelah itu anggarannya misalnya kayak Mensesneg, Mensekbab itu juga dibawah Rp400 an miliar. Nah ini yang perlu kita sadari secara apa namanya, menyeluruh, adalah ini mesti ... Pak, kalau kita tidak bisa mengalokasikan Rp1,9 triliun, resikonya bagaimana dalam proses demokrasi dan dalam konteks regenerasi kepemilihan pemilih di daerah ini menurut saya penting, jangan sampai itu kan jadi malapetaka secara demokrasi, begitu lho.

Jadi Pak Arif, kalau Pak Arif kekurangannya sebanyak itu dan itu bisa dipertanggungjawabkan, itu logika yang saya yakini adalah mestinya Menteri Keuangan atau Pemerintah secara umum menyetujui, karena itu konsekuensinya pada seperti, sebagaimana kita punya hajat pemilu, Pak. Pemilu kita alokasikan Rp19 triliun, karena itu *urgent*, mendesak, itu lho.

Nah maksud saya dalam konteks ini, ini kan apa namanya, Bapak mengalokasikan dua ya, jadi dengan tambahan itu ya, terkait dengan dukungan manajemen sama apa, begitu lho. Jadi saya ingin penegasan, ini kita mesti sikapi kayak apa? Karena kekurangannya Rp1,9 triliun begitu Pimpinan. Bukan sedikit, itu kan nyaris Rp2 triliun, itu bukan barang sederhana dan duit, ha?

KETUA RAPAT :

1,034.

F-PKS (SUTRIYONO, S.Pd., M.Si.):

Yang tadi mana, yang tadi itu? Oh yang tadi saya bacanya disitu masalahnya. Oh oke. Jadi kekurangannya Rp1,034 triliun ini kan? Nah ini menurut saya ini kan kita harus seriusi, karena kita ini mitra kerja Komisi II dalam konteks juga Pemerintah dan politik dalam negeri, begitu. Ini menurut saya Pak, kalau kekurangannya sebanyak itu, mungkin kalau hanya sekedar Bapak yang bicara, secara ... "ah ini KPU", mungkin lihat begitu. Tapi kalau ini memang menjadi hajat negara Pak, keputusan nasional, makin harus *firm*, begitu lho. Nah saya juga ingin tahu gambaran, bagaimana penjelasan, argumentasi, terkait dengan kebutuhan sebanyak Rp1 koma sekian triliun itu. Itu yang dari KPU ya.

Dari Pak Gun saya pikir, apa, Rp300 miliar ya Pak ya?

KETUA RAPAT:

Rp349 miliar.

F-PKS (SUTRIYONO, S.Pd., M.Si.):

Kalau kita sih setuju Pak, kalau ada duitnya begitu lho. Jadi kalau saya Bu Pimpinan, rapat, karena ini adalah dalam konteks suksesnya tanggung jawab target kinerja mitra kerja Komisi II, kalau saya secara pribadi Bu, ini kekurangannya harus kita perjuangkan dan kita dukung. Jadi tinggal bagaimana caranya kita dukung agar Bapak bisa berhasil ini.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ada tambahan? Cukup? Kita berikan waktu dulu ya.

Silakan Pak Arif untuk menanggapi tadi dari Pak Dadang, Ibu Sarwindah dan juga Pak Sutriyono.

KPU/SEKJEN (ARIF RAHMAN HAKIM):

Cukup Pak Arif? Ada yang mau menambahkan, yang untuk KPU dulu?

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih atas masukannya.

Yang pertama mengenai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Salah satunya tadi, yang pada ...

adalah kekuatiran tentang adanya permainan yang tidak terkontrol ditingkat KPU dibawah kita, di kabupaten, di PPK, PPS.

Dari KPU, kegiatan utama untuk meningkatkan kepatuhan kepada para penyelenggara, yang pertama memang kita melakukan kegiatan Bimtek Pak. Jadi memberikan pemahaman, memberikan penegasan tentang SOP-SOP yang harus dilakukan di tingkat badan penyelenggara adhoc. Memang satu tantangan, karena memang penyelenggara di adhoc ini jumlahnya besar. Sehingga yang seharusnya sebagai contoh, kegiatan pemutakhiran data pemilih ya, yang seharusnya kemudian dilakukan bimtek dengan intensitas yang lebih tinggi, tetapi kan anggaran kita juga terbatas dan tidak bisa dilakukan secara ideal ya, misalkan tiga kali dianya. Tapi kita hanya bisa melaksanakan dua kali.

Kemudian di dalam rancangan kita yang sekarang kami sampaikan, untuk penegakkan disiplin terhadap pelanggaran-pelanggaran, kami juga punya kegiatan di **Inspektorat**. Sekarang ini kebutuhan kami untuk melakukan **pemeriksaan, melakukan pendampingan audit baik** di provinsi, kabupaten, dan juga kabupaten untuk mensupervisi di badan adhoc, ini jumlahnya memang masih belum bisa terpenuhi. Yang untuk pilkada, kegiatan pendampingan di daerah nanti di badan adhoc, memang alokasinya dari APBD, Pak. Tapi yang kami butuhkan untuk melakukan supervisi sampai di kabupaten dan provinsi sebesar Rp76 miliar,

Karena memang satker kita banyak, baru bisa dipenuhi Rp19 miliar, kalau alokasinya 2,1. Jadi ini untuk kaitannya dengan penegakkan disiplin ya, pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan, itu pengawasan itu. Untuk sampai provinsi, kabupaten, kami mengusulkan, merencanakan sebesar Rp76,7 miliar. Baru terpenuhi Rp19 miliar.

Kemudian untuk melakukan karena KPU sebagai penanggungjawab akhir dari pilkada serentak, kami juga punya tanggung jawab untuk melakukan Bimtek, paling tidak untuk badan sampai dengan provinsi dan kabupaten. Ini juga masih belum terpenuhi. Kalau kita merencanakan sekitar Rp90,7 miliar sekarang baru terpenuhi Rp36 miliar. Jadi masih kurang 54, untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM kita.

Kemudian dari Pak Triyono mengenai apa kira-kira pengaruhnya apabila kemudian tidak bisa terpenuhi Pak, resikonya. Memang untuk penyelenggaraan pilkada, anggarannya dari APBD. Untuk penyelenggaraan pilkada. Tapi tadi kita punya mimpi ya, punya, agar tingkat layanan KPU itu juga bisa lebih baik sesuai dengan kementerian yang lain. Jadi kami itu untuk kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran, ini kalau bahasanya Pak Dadang ini masih minta santunan kepada kabupaten. Untuk penyediaan. Jadi ada yang dibangun, kita mengusulkan untuk pembangunan, ada juga yang rehab, Pak. Jadi untuk biaya tadi yang kami kuatirkan di daerah itu, bisa saja nanti kemudian saling iri. Karena Bawaslu kan rencananya juga akan melakukan penyediaan sarana yang dananya cukup memadai. Tapi KPU kan biasanya dibawah itu kan saling membanding-bandingkan. "Kantornya Bawaslu bagus, KPU tidak bagus", padahal anggarannya memang beda jauh, kami 2,1 di Bawaslu 2,9 ya. Sekitar itu. Jadi KPU jalan kaki, Bawaslu naik motor, kayak begitu lah. Di daerah biasanya begitu, membandingkan. Makanya kami berupaya terus mencoba menyakinkanlah bahwa apa namanya, keharmonisan, kepatutan antara KPU dan Bawaslu itu perlu jadi

pertimbangan.

Kalau dari sisi apa namanya, pilkada gagal, tidak ya Pak. Tapi dari sisi kualitas layanannya pasti akan berkurang. Jadi yang harusnya dilakukan Bimtek tiga kali, menjadi tidak ada Bimtek. Yang seharusnya kita bisa melayani, memberikan pelayanan dengan dukungan sarana yang memadai, ternyata kita tidak bisa memberikan dengan misalnya dukungan internet, karena kita ingin memberikan pelayanan online, itu tidak bisa kita penuhi karena anggarannya operasionalnya tidak mencukupi.

Demikian.

F-PKS (SUTRIYONO, S.Pd., M.Si.):

Bu,

Sekilas, Bu.

Pak Arif, minta informasi sama Pak Gun juga ini, beberapa periode pilkada yang lalu ini kan ada semacam gap ya, jadi pas pemilu, pemilu legislative, dia dapat apa istilahnya, honor atau apa itu sekian, pas pilkada itu sekian. Itu nanti ketika pilkada serentak itu ada perbedaan tidak dengan yang kemarin?

KPU/SEKJEN (ARIF RAHMAN HAKIM):

Ya jadi untuk pilkada yang sekarang, yang besok ya Pak ya, 2020, kami sudah mengajukan ke Kementerian Keuangan untuk adanya kenaikan honor di Badan Penyelenggara Adhoc, tapi memang belum direspon. Kami sudah mengajukan untuk PPK dan TPS itu ya nilainya setara dengan UMR, Pak. APBD, tapi kan standarnya dari kita Pak, standarnya APBN. Karena pertanggungjawabannya menggunakan mekanisme APBN.

F-PKS (SUTRIYONO, S.Pd., M.Si.):

Karena begini Bu, karena ... itu lebih banyak dari pada pas pemilu legislative, begitu lho. Jadi seolah-olah ini kayak presiden sama DPR tidak begitu penting daripada kepala daerah, kan begitu kan. Ini menurut saya juga perlu kita cermati juga, karena itu SK-nya dari KPU Pusat ya.

KETUA RAPAT:

Pak Triyono ini memang sudah siap-siap maju Pak, maksudnya. Maju calon. Makanya.

Ya, silakan, ini masih KPU dulu ya Pak, habis nanti ke Bapak.

F-P GOLKAR (Drs. H. DADANG S MUCHTAR):

Pak Arif,

Saya sebetulnya, dulu ini, cerita dulu ya, tapi singkat, hajar loe, saya dulu cita-cita saya ingin jadi Komisi II itu ingin menyatukan ide kita, tapi yang benar itu ... sebenarnya yang sering saya katakan, kalau nawaitunya mau menghemat itu, bisa. Atau menggeser-geser anggaran itu, untuk hemat ya. Karena kalau mau jujur, kita sadar, kegiatan KPU dari tahun ke tahun dari mulai berdirinya KPU itu kan bimtek, pemutakhiran data, terus, itu saja. Itu sebetulnya kalau mau dihemat, dihemat kok, bisa. Apa iya setiap mau pilkada ada bimtek, setiap pemilu ada bimtek dan sebagainya, tinggal kitanya, kemauannya. Jadi kalau ... Pak Dadang sekali ngomong bicaranya tentang religious. Nawaitu kita. Dan ini Bu Ninik ya, saya jauh-jauh sebelum jadi anggota DPR, pada tahun pemilu, 2000 berapa sebelumnya? Yang saya katakan ... jadi ... ini, saya sudah membuat uji coba, karena borosnya pemilu ini adanya pada honor pekerja. Anggota KPPS, ini pekerja. Nah makanya saya waktu itu punya ide, bahwa khusus di Jawa, yang terjangkau, begitu kan, bahwa tidak ada pilkades ada 5 TPS. Dari umur saya 1 tahun sampai sekarang 68 tahun, tidak ada pilkades itu adanya TPSnya lebih dari 1. Padahal itu fluktuatif ada yang hak pilihnya 5000, paling sedikit 2000, ada yang sampai 18 ribu pun satu lapangan. Pernah tidak, ada tidak pilkades, di kampung saya, 18 ribu saja satu lapangan bola. Nah makanya saya waktu itu, ide saya, temuan saya itu, dibuatlah kayak pilkades dilapangan, tapi tidak menghilangkan TPS. Nah sekarang kan membengkaknya kan TPSnya ... pintu 1, TPS 1, 2, 3, 4, 5. Kalau andaikata itu TPSnya 20, pintu 1 5 TPS, pintu 2 TPS 6,7, semua dan sebagainya. Jadi uji coba Bu. Panggilin itu KPU pusat, panggilin itu KPU provinsi, semuanya. Dan itu hemat jauh lebih besar. Karena menghemat honor saja sudah Rp20 miliar. Sekarang kan kebijakan baru ini menambah TPS. Jadi luar biasa, begitu lho. Dan waktu itu saya terus-terang saja, yang datang dari staff Dirjen Sospol jaman dulu, sampai yang... terus ada pesan dari Pak Tandri, satu angkatan sama saya. "Dang, pesan Pak Tandri, loe ngurangi rejeki orang sih, jadi tidak pernah datang itu semuanya". Jadi artinya, kesimpulannya, singkat kata, Bapak hatinya dulu, nuraninya, kata Pak Tri ini. Mau hemat atau tidak? Bisa kok kegiatan ini sudah dilakukan. Lho masak sih harus berulang-ulang ditatar lagi. Masak sih yang namanya pendataan berulang-ulang. Wong kita sependapat kalau mau jadi ... capil itu satu itu kan sudah satu.

Jadi intinya saya terakhir ini, Mas Arif sama Mas Gunawan, anda bersyukur jadi Sekjen, mengeluarkan duit segitu banyaknya itu, coba deh nawaitunya nawaitu hemat, begitu. Jangan nawaitu kurang saja. Kalau nawaitunya kurang saja sih ya sudah. Saya menyetujui saja, kalau negaranya kayak kok. Segala ibukota saja dipindahin Rp490 triliun, ya tidak? Masak sih mau tambahan Rp1 triliun tidak mampu? Walaupun 90%, 100% dari APBN, ya kan begitu. Sisanya daribesar, hutang.

Jadi untuk itu, bersifat, ini sharing saja. Cuma Bapaknya hemat jadi kitanya dukung supaya nanti di Banggar itu tidak... triliun, orang triliun ya istilahnya, kalau minta itu rasional, ya tidak. Kalau mintanya kegedean, orang mau ngasih juga sudah was-was dulu. Jadi Pak Arif dengan staff, Pak Gunawan dengan staff, masih sih sebenarnya yang bisa dihemat-hemat ini, begitu lho Pak Arif. Bisa sebetulnya, karena itu rutinitas semua. Masak sih

KPU sudah 3 kali, 4 kali jadi KPU masih ditatar lagi, masih bimtek lagi. Anggota KPU yang baru kan bisa sedikit. Kasarnya begitu, ngomong jeleknya. Tapi nyuwun sewu ya, saya kalau ngomong itu nyuwun sewu, Pak Arif sama Pak Gunawan. Jangan tersinggung. Niat ingsunnya. Ya Pak? Mungkin itu saja Bu, bersifat santai, bersifat empiric juga. Uji coba itu, tidak ada yang datang, tahu tidak? KPU provinsi tidak datang, KPU pusat tidak datang, yang datang jadi direktur, Dirjen Sospol. Permohonan maaf. Kalau itu dilaksanakan di Jawa, 50%. Dibikin lagi pilkades. Dan partisipasi orang datang banyak. Karena kalau pilkades itu Bu, itu pasti tukang dagang juga banyak kan? Coba datang ke pilkades, ada bakmi, ada macam-macam, ada sate ayam, semuanya lengkap. Jadi kalau pemilupun dibuat seperti itu di desa satu, titik. Tapi general... beberapa TPS dalam titik itu, Insya Allah partisipasinya tinggi. Bapak tadi partisipasi masyarakat. Sampai hari ini evaluasi, sejauh mana sih partisipasi masyarakat tentang ikut pengawasan? Kagak. Begitu kasih duit ya terima. Bagaimana mau mengawasi Bawaslu. Jadi itu juga mubazir itu uangnya untuk apa, penataan partisipasi masyarakat, tidak ada, masyarakat dikasih duit menerima kok, Bawaslu diam saja. Kasarnya kan begitu, tapi jangan tersinggung, Pak Gunawan.

Terima kasih, panjang lebarnya, aku mohon izin.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dadang.

Jadi kalau kemarin ada penambahan TPS itu karena apa kita pertama terikat dengan beban waktu, waktunya mulai pagi sampai Cuma maksimal jam 13,00 WIB, padahal yang dicoblos lebih banyak kemarin. Ada tambahan presiden, akhirnya menyepakatinya ditambah. Waktu tidak mungkin ditambah, yang bisa ditambah adalah TPSnya saat itu, seperti itu. Tapi yang usul Pak Dadang tadi cukup rasional, bisa menjadi alternatif ke depannya.

Selanjutnya saya kasih waktu ke Pak Gun. Pak Gun belum jawab, Pak Tri. Sabar Pak Tri.

Silakan Pak.

BAWASLU/SEKJEN (GUNAWAN SUSWANTORO):

Baik, terima kasih atas respon Bapak-Ibu yang terhormat anggota Komisi II. Saya merespon apa yang Pak Dadang sampaikan tadi. Menarik Pak, korupsi itu bisa kita hilangkan, bisa karena SDMnya atau karena sistemnya. Kalau SDMnya merasa kita kesulitan karena terlalu banyak, saya pikir sistemnya yang perlu kita sempurnakan.

F-P GOLKAR (Drs. H. DADANG S MUCHTAR):

Saya potong dulu, supaya diskusi.

Korupsi di Indonesia, bagaimana *top leadernya*. Tunggu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena system. Yang saya katakan karena system, *you*

betul. Contohnya terjadi mafia penggelembungan suara, bukan hanya Bawaslu, Bahwa ada peluang untuk orang membuat 500 ribu orang jadi KPPS maupun ... Yang kedua, system perlindungan yang membuat orang itu, peluang itu besar. Jadi ditarik ke desa, begitu dihitung ke KPPS, yang hitung hanya anggota KPPS, ... banget, yang lain menyaksikan diluar, hanya dilayar monitor. Layar TV. Itulah yang membuat peluang, problemnya kecil, iming-imingnya Rp100 juta, Rp200 juta, bahkan ada yang Rp1 miliar. Disitu Pak, jadi apa yang dikatakan benar, tapi ... yang di Indonesia ini, kalau *top leademya* memilih ... minimal ... tapi memberantas korupsi Tapi kalau *top leademya* punya nawa itu tinggi untuk memberantas, Insya Allah dibawah itu akan diminimalis. Bukan kebebasan, tapi Jadi itu benar, ... tapi *top leader* Pak, kalau bupati bersih, dibawah pasti bersih, kalau gubernur bersih, disana bersih. Minimalis, tidak bersih sekali, tetap benjol.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ternyata Pak Dadang itu kalau bicara tidak perlu mic pun, sudah kencang suaranya.

BAWASLU/SEKJEN (GUNAWAN SUSWANTORO):

Maaf, Pimpinan.

Yang saya maksud sebetulnya, sepanjang system pemilu ini masih proporsional terbuka, disitulah system yang membuat semua pelaku menjadi koruptor, itu maksud saya.

KETUA RAPAT

Ya, lanjut Pak. Lanjut Pak Gun, silakan Pak Gun, lanjut.

Kita ini mohon maaf, kita terbagi dua ruangan. Yang satu ruangan sebelah, jadi beberapa teman harus kesana.

Silakan.



RISALAH RAPAT KONSINERING
Senin, 26 Agustus 2019

SIDE A & B

TRANSKRIPTOR:

APL - Titiek Endartini, S.A.P

30/08/19

KETUA RAPAT (Hj. NIHAYATUL WAIFIROH, MA/F-PKB):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakauh.
Salam sejahtera untuk kita semua
Selamat malam.

Yang saya hormati Saudara Sekjen KPU RI beserta jajarannya,
Saudara Sekjen Bawaslu RI beserta jajarannya,
Anggota Komisi II yang saya hormati.

Malam ini kita akan melakukan Rapat Dengar Pendapat, Konsinering, untuk membahas tentang RAPBN Tahun 2020. Dan dengan bacaan *Bismillahirrahmanirrahim*, rapat ini akan buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.50 WIB)

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Selanjutnya berturut-turut saya akan minta dari KPU dulu, lalu Bawaslu untuk menyampaikan presentasi. Selanjutnya akan di dari anggota Komisi II untuk memberikan tanggapan.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KONSINERING
Senin, 26 Agustus 2019

SIDE A & B

TRANSKRIPTOR:

APL-Titik Endarlin, S.A.P.

20/08/19

KETUA RAPAT (HJ. NIHAYATUL WAFIROH, MA/F-PKB):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Selamat malam.

Yang saya hormati Saudara Sekjen KPU RI beserta jajarannya,
Saudara Sekjen Bawaslu RI beserta jajarannya,
Anggota Komisi II yang saya hormati.

Malam ini kita akan melakukan Rapat Dengar Pendapat Konsinering
Untuk membahas tentang RAPBN Tahun 2020. ~~Qasih, senang, basa-basi~~
~~Disampaikan dalam suasana yang tidak terbuka~~

(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.50 WIB)

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Selanjutnya berturut-turut saya akan minta dari KPU dulu, lalu Bawaslu
Untuk menyampaikan presentasi. Selanjutnya akan di dari anggota Komsel II
Untuk memberikan tanggapan.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KONSINYERING

: Senin, 26 Agustus 2019



Agustus 2019						
S	S	R	K	J	S	M
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Today

KETUA RAPAT (Hj. N

Assalamualaikum Wa
Salam sejahtera untuk
Selamat malam.

TANGGAL
RAPAT

Yang saya hormati Saudara Sekjen KPU RI beserta jajarannya,
Saudara Sekjen Bawaslu RI beserta jajarannya,
Anggota Komisi II yang saya hormati.

Malam ini kita akan melakukan Rapat Dengar Pendapat, Konsinyering,
untuk membahas tentang RAPBN Tahun 2020. Dan dengan bacaan.
Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini kami buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.50 WIB)

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Selanjutnya berturut-turut saya akan minta dari KPU dulu, lalu Bawaslu
untuk menyampaikan presentasi. Selanjutnya akan di dari anggota Komisi II
untuk memberikan tanggapan.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RI SALAH RAPAT KONSINYERING
Senin, 26 Agustus 2019

SIDE A & B

KETUA RAPAT (Hj. NIHAIKAH)
Assalamualaikum Warahab
Salam sejahtera untuk k
Selamat malam.
Yang saya hormati
Saudara Sekjen Bawaslu
Anggota Komisi II yang
Malam ini kita akan
untuk membahas tentang
Bismillahirrahmanirrahim.

NAMA APL OR:
APL - Titiek Endartini, S.A.P

Choose an item.

- APL - AGA SUKMA DEWANTAMA, A.Md
- APL - MICHEL IKE PERMATASARI, A.Md. Sek.
- APL - RIRI AULIA YONNI, A.Md.
- APL - NITA SETYA EFRIYANI, A.Md.
- APL - TRESAMAIDA SIMATUPANG, A.Md.
- APL - FARINI MAYDIATRI CAESARA PUTRI, A.Md.
- APL - SOFHIA ANJANI SWID, A.Md. A.P.S
- APL - SHAFAA AULIA SURAJI, A.Md. A.P.S
- APL - FITRI FEBRIYAMIN, A.Md. A.B
- APL - AZWINA ZAHRA AKHYAR, A.Md. A.P.S
- (R) APL - Titiek Endartini, S.A.P

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Selanjutnya berturut-turut saya akan minta dari KPU dulu, lalu Bawaslu untuk menyampaikan presentasi. Selanjutnya akan di dari anggota Komisi II untuk memberikan tanggapan.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KONSINYERING
Senin, 26 Agustus 2019

SIDE A & B

TRANSKRIPTOR:

APL - Titiek Endartini, S.A.P

30/08/19

TANGGAL
PENGERJAAN
TRANSKRIP

KETUA RAPAT	Agustus 2019							VF-PKB): h.
	S	S	R	K	J	S	M	
Assalamualaikum	29	30	31	1	2	3	4	
Salam sejahtera	5	6	7	8	9	10	11	
Selamat malam	12	13	14	15	16	17	18	
Yang saya	19	20	21	22	23	24	25	
Saudara Sekj	26	27	28	29	30	31	1	
Anggota Komisi	2	3	4	5	6	7	8	
	Today							

RI beserta jajarannya,
gar Pendapat, Konsinyering,
20. Dan dengan bacaan.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.50 WIB)

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Selanjutnya berturut-turut saya akan minta dari KPU dulu, lalu Bawaslu untuk menyampaikan presentasi. Selanjutnya akan di tanyakan dari anggota Komisi II untuk memberikan tanggapan.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KONSINERING

Senin, 01/06/2020

SIDE KASET

SIDE A & B

SIDE KASET

Choose an item.

SIDE A

SIDE B

SIDE A & B

APL-T
T1

KETUA RAPAT (Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA/F-PKB):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua

Selamat malam.

Yang saya hormati Saudara Sekjen KPU RI beserta jajarannya,
Saudara Sekjen Bawaslu RI beserta jajarannya,

Anggota Komisi II yang saya hormati.

Malam ini kita akan melakukan Rapat Dengar Pendapat, Konsinering,
untuk membahas tentang RAPBN Tahun 2020. Dan dengan bacaan
Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini kami buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.50 WIB)

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Selanjutnya berturut-turut saya akan minta dari KPU dulu, lalu Bawaslu
untuk menyampaikan presentasi. Selanjutnya akan di dari anggota Komisi II
untuk memberikan tanggapan.

Choose an item.

Reference

1 2 3 4

KOMISI II

KETUA RAPAT

F-P NASDEM (Drs. H. TAMANURI, MM)
F-P NASDEM (KRESNA DEWANATA PHROSAKH)
F-P NASDEM (H. BENI SUDRAJAT)
F-PKB (Hj. EVI FATIMAH, S.Ag, M.A.P)
F-PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si)
F-PKB (Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA)
F-PKB (H.J. ROHANI VANATH)
F-PKS (Drs. CHAIRUL ANWAR, Apt.)
F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.)
F-PKS (SUTRIYONO, S.Pd., M.Si.)
F-PKS (K.H. AUS HIDAYAT NUR)
F-PDIP (AGUS SUSANTO)
F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc)
F-PDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH, MH.)
F-PDIP (DWI RIA LATIFA, SH, M.Sc)
F-PDIP (TUTI NUSANDARI ROOSDIONO)
F-PDIP (ARIF WIBOWO)

F-PDIP /Drs. SIRMAD II, M.Pd)

KETUA RAPAT (Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA/F-PKB)

Assalamualaikum Warahmasullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua

Selamat malam.

Yang saya hormati Saudara Sekjen KPU RI beserta jajarannya,
Saudara Sekjen Bawaslu RI beserta jajarannya,
Anggota Komisi II yang saya hormati,

Malam ini kita akan melakukan Rapat Dengar Pendapat, Konsinyering,
untuk membahas tentang RAPBN Tahun 2020. Rap. dengan...bagaimana.
Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini kita buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.50 WIB)

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Selanjutnya berturut-turut saya akan minta dari KPU dulu, lalu Bawaslu
untuk menyampaikan presentasi. Selanjutnya akan di- dan anggota Komisi II
untuk memberikan tanggapan.

NAMA PEMBICARA

Silakan Pak Art.

PU/SEKJEN (ARIF RAHMAN HAKIM):

Assalamualaikum Warahmasullahi Wabarakatuh.
Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.

ing saya hormati Pimpinan Komisi II DPR RI beserta Bapak/Ibu
Anggota Komisi II DPR RI,
ing kami hormati rekan sejawat kami, Sekjen Bawaslu beserta jajaran,

Sebelum kami menyampaikan paparan, kami ingin memperkenalkan. Ter-
im KPU Jember dalam susunan internal para kepala Biro di KPU. Jadi di-
bagi ke dalamnya Pak. Purnomo, Kepala Biro Logistik. Yang peling banyak.
Ik. Nanggah Supriyatno, Kepala Biro Keuangan. Yang di belakang. Kepala
Biro Tekmas, Ibu Nusantari. Pak Adi Wisaya, Inspektor. Ibu Yayuk, Kepala
Biro Umum, Pak Widiani. Wakil Kepala Biro Perencanaan, Pak Lukman, Kepala
Biro STM KPU dan Pak Supriyatra, Wakil Kepala Biro Tekmas. Lengkapnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Komisi II beserta
Ibunya, yang selalu mendukung KPU, sehingga KPU mendapatkan
permudah pada saat mengajukan usulan penambahan anggaran kepada
Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal yang terkait disana, Dirjen
Anggaran, tentunya. Kami akan menyampaikan, yang pertama
mengenai realisasi anggaran KPU, kemudian anggaran KPU Tahun 2020 dan
juga program prioritas KPU, kemudian kebutuhan anggaran KPU yang masih
belum terpenuhi untuk Tahun 2020 serta permohonan pergeseran anggaran
untuk alokasi pagu anggaran yang sekarang ini agar lebih sesuai dengan
kebutuhan KPU.

Realisasi anggaran KPU Tahun 2019, kami sudah memanfaatkan
82,72% dari anggaran yang diberikan kepada KPU di tahun 2019 sebesar
Rp18.104.129.000.000,00, sudah diselesaikan Rp14,88 triliun. Pemanfaatan
yang sebesar 82,72% ini sudah sesuai dengan target yang atau rencana kerja
di KPU.

Kemudian pada 2019, kami berupaya memanfaatkan anggaran yang
sudah diberikan di KPU, meskipun ada perubahan-perubahan tambahan
kebutuhan, kasi. Ibu, meminta alokasi tambahan. Tetapi kami
kemudian melakukan optimisasi dengan cara merevisi anggaran yang
sudah ada di KPU. Salah satu yang terakhir, kami diminta untuk memberikan
saran/tujuan kepada personil kami di Badan Penyelenggaraan Ad hoc, itu juga
kami tidak meminta tambahan dari Kemenseran Keuangan, kami
menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan di KPU.

Untuk tahun 2020, coba 2020 ya, KPU mendapatkan alokasi anggaran
sebesar Rp215.511.565.000,00. Alokasi anggaran yang diberikan sekarang,
ini masih belum sesuai dengan usulan kami. Jadi KPU mengusulkan, untuk
tahun 2020, anggaran yang kita butuhkan adalah sebesar
Rp3.184.249.000.000,00, itu usulan kami. Sehingga dibandingkan dengan
usulan yang disusulkan oleh KPU, kami masih membutuhkan dukungan dari



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KONSINYERING
Senin, 26 Agustus 2019

SIDE A & B

TRANSKRIPTOR:

APL - Titiek Endarlini, S.A.P

30/08/19

BOX TRANSKRIP



KETUA RAPAT (Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA/F-PKB):

Assalamualaikum Warahmaullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua

Selamat malam,

Yang saya hormati Saudara Sekjen KPU RI beserta jajarannya,
Saudara Sekjen Bawaslu RI beserta jajarannya,
Anggota Komisi II yang saya hormati.

Malam ini kita akan melakukan Rapat Dengar Pendapat, Konsinyering,
untuk membahas tentang RAPBN Tahun 2020. Dan dengan bacaan
Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini kami buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.50 WIB)

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Selanjutnya berturut-turut saya akan minta dari KPU dulu, lalu Bawaslu
untuk menyampaikan presentasi. Selanjutnya akan di dari anggota Komisi II
untuk memberikan tanggapan.



PENGATURAN 0,5 INCH

Header

KPU/SEKJEN (ARIF RAHMAN HAKIM):

Assalamualaikum Warahm azulillahi Wab arakatuh.
Selamat malam, ~~adapun~~ sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi II DPR RI beserta Bapak-Ibu anggota Komisi II DPR RI,

Yang kami hormati rakan sejawat kami Sekjen Bawaslu beserta jajaran,

Sebelum kami menyampaikan padangan, kami juga mengucapkan Terimakasih atas pengertian dan dukungan yang telah diberikan oleh seluruh kawan-kawan Pak Bambang, Kanala, Biro Logistik, Yang Palmo, Munz, Pak Nanang, Supriyatna, Enala, Biro Keuangan, Yang di belakang, Kepala Biro Tekmas, Ibu Nursantini, Pak Adi Wigaya, Inspektor, Ibu Yayuk, Kepala Biro Umum, Pak Wagian, Wakil Kepala Biro Perencanaan, Pak Ludi Kepala Biro STM KPU dan Pak Supriyatna, Wakil Kepala Biro Tekmas. ~~Terimakasih~~

Kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Komisi II beserta anggota, yang selalu mendukung KPU, sehingga KPU mendapatkan kenyamanan pada saat mengajukan usulan penambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal yang terkait disana, Dirjen Anggaran, terutama. Kami akan menyampaikan, yang pertama mengenai realisasi anggaran KPU, kemudian anggaran KPU Tahun 2020 dan juga program prioritas KPU, kemudian kebutuhan anggaran KPU yang masih belum terpenuhi untuk Tahun 2020 serta permohonan pergeseran anggaran untuk alokasi pagu anggaran yang sekarang ini agar lebih sesuai dengan kebutuhan KPU.

Realisasi anggaran KPU Tahun 2019, kami sudah memantauan 82,78% dari anggaran yang diberikan kepada KPU di tahun 2019 sebesar Rp18.104.139.000.000,00, sudah direalisasikan Rp14,83 triliun. Pemantauan yang sebesar 82,78% ini sudah sesuai dengan target yang atau rencana kerja di KPU.

Kemudian pada 2019, kami berupaya mencapai target anggaran yang sudah ada di KPU, meskipun ada perubahan-perubahan terkait anggaran, kegiatan kami tidak meminta alokasi tambahan. Tetapi kami kemudian melakukan optimisasi dengan cari merevisi anggaran yang sudah ada di KPU. Salah satu yang terakhir, kami diminta untuk memberikan santunan kepada personil kami di Badan Petyelenggaran Ad hoc, itu juga kami tidak meminta tambahan dari Kementerian Keuangan, kami menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan di KPU.

Untuk tahun 2020, coba 2020, ya, KPU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2.159.511.595.000,00. Alokasi anggaran yang diberikan sekarang, itu masih belum sesuai dengan usulan kami, Jadi KPU mengusulkan, untuk tahun 2020, anggaran yang kita butuhkan adalah sebesar Rp3.194.249.000.000,00. Itu usulan kami. Sehingga dibandingkan dengan usulan yang diajukan oleh KPU, kami masih membutuhkan dukungan dari

Footer

Footer

FONT TATA NASKAH
ARIAL 12

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KONSINERING
Senin, 26 Agustus 2019

SIDE A & B

TRANSKRIPTOR:
APL - Titiek Endartini, S.A.P
30/08/19

KETUARAPAT (Hi. NIHAYATUL WAFIROH, MA/ F-PKB):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua
Selamat malam.

Yang saya hormati Saudara Sekjen KPU RI beserta jajarannya,
Saudara Sekjen Bawaslu RI beserta jajarannya,
Anggota Komisi II yang saya hormati.

Malam ini kita akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat, Konsinering,
untuk membahas tentang RAPBN Tahun 2020. Dan dengan bacaan
Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini kami buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.50 WIB)

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Selanjutnya berturut-turut saya akan minta dari KPU dul, lalu Bawaslu

Font 12 A A Aa ab A

Font

1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 6 1 1 8 1 1 10

Paragraph 1,0 (highlighted with a red circle)

1,15
1,5
2,0
2,5
3,0
Line Spacing Options...
Remove Space Before Paragraph
Add Space After Paragraph

FORMAT
TATA
NASKAH LINE
SPACING 1,0



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KONSINERING
Senin, 26 Agustus 2019

SIDE A & B

TRANSKRIPTOR:
APL - Titlek Endartini, S.A.P
30/08/19

KETUA RAPAT (Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA/F-PKB):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat malam.

Yang saya hormati Saudara Sekjen KPU RI beserta jajarannya,
Saudara Sekjen Bawaslu RI beserta jajarannya,
Anggota Komisi II yang saya hormati.

Malam ini kita akan melakukan Rapat Dengar Pendapat Konsinering,
untuk membahas tentang RAPBN Tahun 2020. Dan dengan bacaan
Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini kami buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.50 WIB)

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Selanjutnya berturut-turut saya akan minta dari KPU dulu, lalu Bawaslu

Document3 -

Insert Page Layout References Mailings Review View Developer

Margins Orientation Size Columns Breaks Line Numbers Hyphenation Watermark Page Color Page Borders Page Background

Indent Left: 0 Right: 0

Last Custom Setting
Top: 2,54 cm Bottom: 2,54 cm
Left: 3,17 cm Right: 3,17 cm

Normal
Top: 2,54 cm Bottom: 2,54 cm
Left: 2,54 cm Right: 2,54 cm

Narrow
Top: 1,27 cm Bottom: 1,27 cm
Left: 1,27 cm Right: 1,27 cm

Moderate
Top: 2,54 cm Bottom: 2,54 cm
Left: 1,91 cm Right: 1,91 cm

Wide
Top: 2,54 cm Bottom: 2,54 cm
Left: 5,08 cm Right: 5,08 cm

Mirrored
Top: 2,54 cm Bottom: 2,54 cm
Inside: 3,18 cm Outside: 2,54 cm

Custom Margins...

FORMAT CUSTOM MARGIN TATA NASKAH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KONSINERING
Senin, 26 Agustus 2019

SIDE A & B

TRANSKRIPTOR:
APL - Titiek Endartini, S.A.P
30/08/19

NIHAYATUL WAFOH, MA/F-PKB):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua
Selamat malam.

Yang saya hormati Saudara Sekjen KPU RI beserta jajarannya,
Saudara Sekjen Bawaslu RI beserta jajarannya,
Anggota Komisi II yang saya hormati.

Malam ini kita akan melakukan Rapat Dengar Pendapat, Konsinering,
untuk membahas tentang RAPBN Tahun 2020. Dan dengan bacaan
Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini kami buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.50 WIB)

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Selanjutnya berturut-turut saya akan minta dari KPU dulu. lalu Bawaslu

Page Layout References Mailings Review View Developer

Orientation Size Columns Breaks Line Numbers Hyphenation

Watermark Page Color Page Borders

Indent Left: Right:

Page Background

8 | 10 | 12 | 14 | 16 |

FORMAT TATA NASKAH PAPER SIZE A4

INDONESIA

KONSINYERING justus 2019

A & B

RIPTOR:
Hartini, S.A.P.
S19

FIROH, MA/F-PKB):
Tabarakatuh.

jen KPU RI beserta jajarannya,
ajarannya.

Malam ini kita akan melakukan Rapat Dengar Pendapat, Konsinyering,
untuk membahas tentang RAPBN Tahun 2020. Dan dengan bacaan
Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini kami buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.50 WIB)

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Selanjutnya berturut-turut saya akan minta dari KPU dulu, lalu Bawaslu

More Paper Sizes...

Letter
21,59 cm x 27,94 cm

Legal
21,59 cm x 35,56 cm

Statement
13,97 cm x 21,59 cm

Executive
18,41 cm x 26,67 cm

A4
21 cm x 29,7 cm

A5
14,8 cm x 21 cm

B5 (JIS)
18,2 cm x 25,7 cm

Envelope #10
10,48 cm x 24,13 cm

Envelope DL
11 cm x 22 cm

Envelope C5
16,2 cm x 22,9 cm



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 288/PS.13/ Bagian Risalah/11/2019 5 Nopember 2019
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Undangan Rapat.

Yth

1. Plt. Kepala Biro Persidangan I
 2. Kepala Bagian Risalah
 3. Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
 4. Sahat Aditua Fandhiya Silalahi, S.T.
 5. Para Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif dan Jabatan Fungsional Perorangan Legislatif

Jabatan Persegi Setien dan

Bersama ini kami beritahukan, bahwa Bagian Risalah akan mengadakan

Hari, tanggal	:	Rabu, 6 Nopember 2019
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB s/d 11.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Pansus C. Gedung Nusantara II, Lt III DPR-RI Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta-Pusat
Acara	:	Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian serta kehadirannya, kami ucapan terima kasih.

Kepala Bagian Risalah


Muhammad Yus Iqbal, S.E.
NIP. 196707171993021006



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**DAFTAR HADIR
PERISALAH LEGISLATIF, ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF,
DAN PENYUSUN RISALAH**

Hari, Tanggal : Rabu, 6 Nopember 2019
Pukul : 10.00 WIB s.d 11.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pansus C
Acara : Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Muhammad Yus Iqbal, S.E	Kebag Risalah	
2	Dra. Nurani Bodroini	Perisalah Legislatif Ahli Madya	
3	Dra. Tri Budi Utami, M.Si.	Perisalah Legislatif Ahli Madya	
4	Lina Agustina Purwaningrum	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
5	Ana Zuraidah	Asisten Perisalah Legislatif Mahir	
6	Fitri Andrijani	Asisten Perisalah Legislatif Mahir	
7	Marno	Asisten Perisalah Legislatif Mahir	
8	Titiek Endartini	Asisten Perisalah Legislatif Mahir	
9	Siti Asita	Asisten Perisalah Legislatif Mahir	
10	Wilis	Asisten Perisalah Legislatif Mahir	
11	Imi Sismartika	Asisten Perisalah Legislatif Mahir	
12	Elina Indriyat, S.Sos., M.Si.	Asisten Perisalah Legislatif Mahir	
13	Wanti Devi Setiawati, S.E	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
14	Febrianto Wisnu Subroto, S.Pd.	Penyusun Risalah	
15	Ratu Mety Mulyanisari, S.E.	Analis Tata Usaha	



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

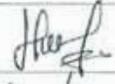
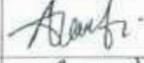
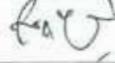
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**DAFTAR HADIR
CPNS PERISALAH LEGISLATIF
DAN ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF**

Hari, Tanggal : Rabu, 6 Nopember 2019
Pukul : 10.00 WIB s.d 11.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pansus C
Acara : Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Diza Nabila Mirza	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
2.	Hijriatul Mabruk	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
3.	Desy Nirmala Setyawati	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
4.	Oki Rusera Azhari V.P.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
5.	Ines Adhita Pambudi	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
6.	Tri Apriliani	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
7.	Anisa Nur Nia Rahmah	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
8.	Sofhia Anjani S	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
9.	Aga Sukma D	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
10.	Shafaa Aulia S	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
11.	Nita S. Efriyani	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
12.	Michel Ike Permatasari	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
13.	Farini Maydiatri Caesara Putri	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
14.	Tresamaida Simalupang	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	

15.	Fitri Febriyamin	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
16.	Azwina Zahra Akhyar	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	
17.	Riri Aulia Yonni	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	

KUESIONER PELAKSANAAN AKTUALISASI

SAMPEL USER

Template transkrip combo box adalah suatu template yang bertujuan memudahkan penggerjaan transkrip rapat dalam DPR yang memuat format penulisan yang sesuai dengan tata naskah DPR RI dan difasilitasi daftar nama pembicara dengan fitur combo box. Template transkrip dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan user, dalam hal ini asisten perisalah dan perisalah legislatif DPR RI (bagian risalah). Untuk itu dibutuhkan respon dan saran dari user untuk dapat terus meningkatkan produk template transkrip.

Terimakasih sudah menjadi sampel user aktualisasi dan diharapkan respon dan saran yang membangun :)

Nama Lengkap

Jabatan

ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF/PERISALAH LEGISLATIF

Penempatan

Choose

1. Bagaimana cara anda mengatur format halaman transkrip?

- manual
- copy paste dari transkrip sebelumnya
- tidak diatur
- Other:

2. Kapan anda mengatur format halaman?

- pada awal penggerjaan
- mengerjakan sambil mengatur
- saat selesai mentranskrip
- jika ada waktu tersisa
- Other:

3. Apakah anda menggunakan format tata naskah DPR RI saat mengerjakan transkrip rapat?

- ya, selalu
- kadang-kadang
- tidak
- Other:

4. Pernahkah format yang telah anda atur berubah dan tidak sesuai dengan tata

naskah yang ada di DPR?

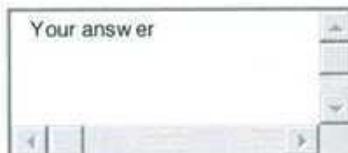
- pernah
- sering
- tidak pernah
- Other:

5. Lalu apa yang anda lakukan untuk memastikan bahwa transkrip yang anda kerjakan formatnya tidak berubah dan memudahkan perisalah untuk mengolah menjadi risalah?

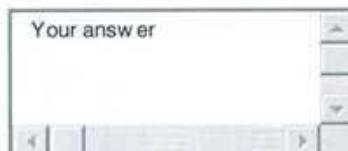
- mengedit ulang
- membiarkan karena itu tugas perisalah
- memakai template transkrip combo box
- Other:

Deskripsi

Menurut pendapat anda perlukah keseragaman format dalam penulisan transkrip rapat? Mengapa?



Bagaimana pengalaman anda menggunakan template transkrip combo box?



Tuliskan respon dan saran anda tentang template tersebut.

HASIL KUESIONER PELAKSANAAN AKTUALISASI SAMPEL USER

QUESTIONS

RESPONSES

5

5 responses



SUMMARY

INDIVIDUAL

Accepting responses



Nama Lengkap

5 responses

Fitri Febriyamin

Anisa Nur Nia Rahmah

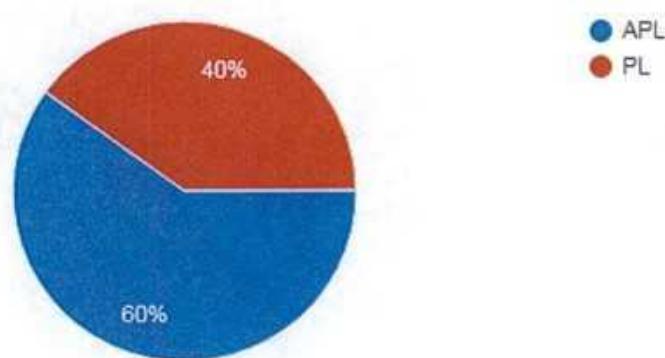
WINA

Nita Setya Efriyani

Oki Rusera Azhari Virgian Puswanda

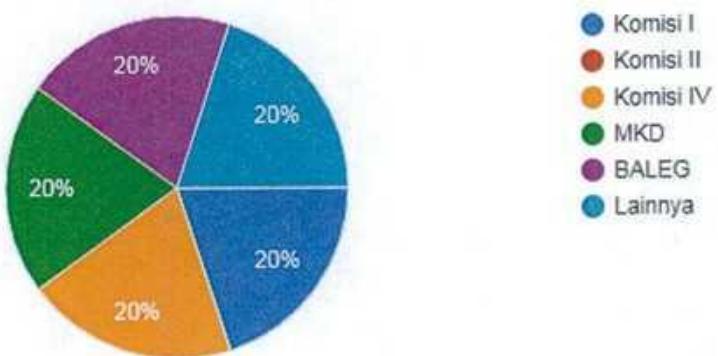
Jabatan

5 responses



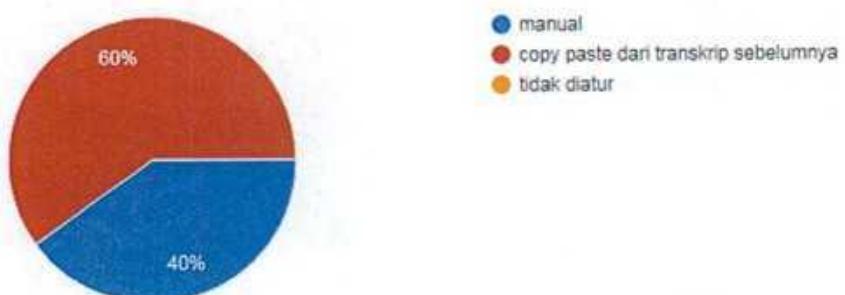
Penempatan

5 responses



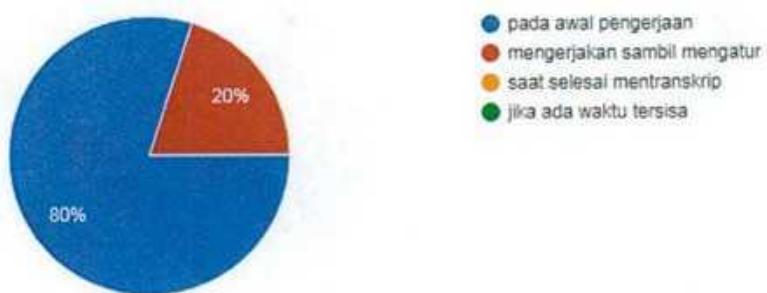
1. Bagaimana cara anda mengatur format halaman transkrip?

5 responses



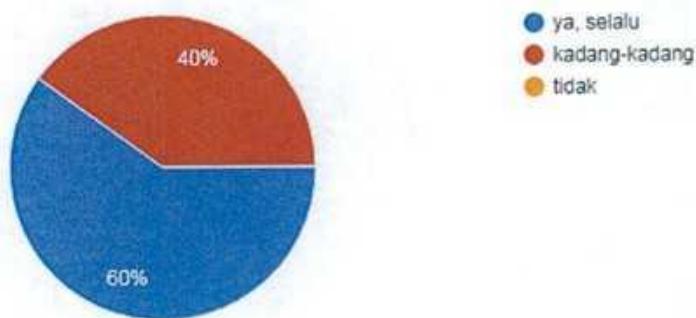
2. Kapan anda mengatur format halaman?

5 responses



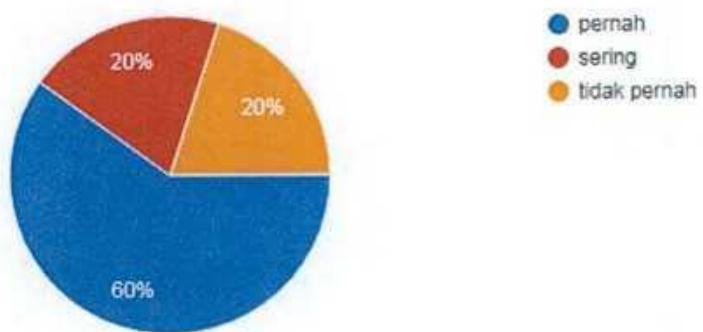
3. Apakah anda menggunakan format tata naskah DPR RI saat mengerjakan transkrip rapat?

5 responses



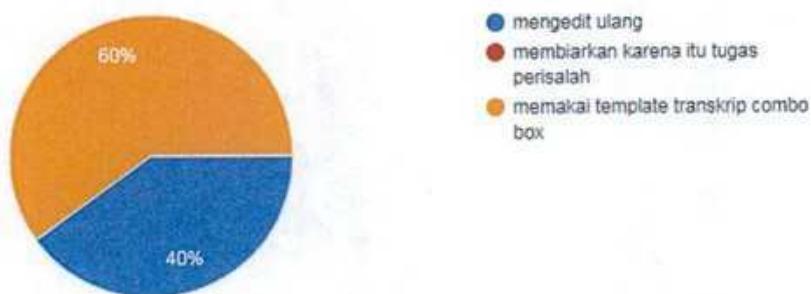
4. Pernahkah format yang telah anda atur berubah dan tidak sesuai dengan tata naskah yang ada di DPR?

5 responses



5. Lalu apa yang anda lakukan untuk memastikan bahwa transkrip yang anda kerjakan formatnya tidak berubah dan memudahkan perisalah untuk mengolah menjadi risalah?

5 responses



Menurut pendapat anda perlukah keseragaman format dalam penulisan transkrip rapat? Mengapa?

5 responses

Perlu, karena untuk memudahkan dan mempercepat proses transkrip

Perlu untuk keseragaman

perlu, agak lebih rapi dan konsisten

Iya perlu . Karena itu sangat penting untuk proses penggerjaan sehingga hasil kerja menjadi rapi

Sangat perlu, karena dengan adanya keseragaman maka kedepannya akan mempermudah dan mempercepat perisalah dalam menyusun risalah rapat sehingga risalah dapat langsung terdistribusikan.

Bagaimana pengalaman anda menggunakan template transkrip combo box?

5 responses

Sangat memudahkan, tidak perlu mengatur format penulisan lagi

Sangat memudahkan. Efisien dan efektif dalam pengerjaan transkrip. Sebagai PL template transkrip combo box akan menawarkan keakuratan

memudahkan dalam penulisan nama pembicara dan menghemat waktu

Sangat membantu. Dan mempercepat pengerjaan transkrip.

Penggunaan transkrip combo bagi saya sangat efektif dalam mempersingkat waktu kerja pembuatan risalah rapat.

Tuliskan respon dan saran anda tentang template tersebut.

5 responses

Sangat berguna dan memudahkan!

Perlu digunakan secara menyeluruh

semoga template ini bisa lebih dikenal banyak APL lain agar terjadi keseragaman format transkrip

Ini merupakan suatu tools kerja yang sangat membantu untuk pengerjaan transkrip, namun ada baiknya dapat dicontohkan atau demo kan cara penggunaan template ini

Saya berharap kedepannya program ini dapat segera di implementasikan karena sangat membantu kami dalam menyusun sebuah risalah rapat

KESIMPULAN:

Stakeholder dalam template ini adalah perisalah dan asisten perisalah dari berbagai penempatan kerja.

Fakta dalam proses pengerjaan transkrip:

1. Sebagian besar perisalah dan asisten perisalah legislatif mengatur halaman dengan cara copy paste dari transkrip sebelumnya (60%), dan sisanya mengatur dengan cara manual. (40%)
Hal itu menunjukkan bahwa belum ada metode baru untuk format halaman yang otomatis seperti dengan template.
2. Sebagian besar perisalah dan asisten perisalah legislatif mengatur halaman pada awal pengerjaan (80%) dan sisanya mengatur sambil mengerjakan transkrip (20%)
Hal itu menunjukkan bahwa APL dan PL memerlukan waktu khusus dalam mengatur format halaman yang seharusnya bisa dilakukan untuk mentranskrip saja.
3. Sebagian besar perisalah dan asisten perisalah legislatif sudah mengatur halaman sesuai dengan tata naskah DPR (60%) namun sisanya masih ada yang kadang-kadang tidak mengatur format transkrip sesuai dengan tata naskah DPR (40%)

Dengan adanya hal itu menunjukkan bahwa belum adanya keseragaman dalam penggerjaan transkrip untuk dapat memudahkan perisalah menolah transkrip menjadi risalah sementara.

4. Sebagian besar perisalah dan asisten perisalah legislatif (60%) pernah mengalami perubahan format penulisan yang akhirnya tidak sesuai dengan tata naskah DPR, dan sebagian (20%) sering mengalami, dan yang terakhir (20%) tidak pernah. Jadi hampir 80% bermasalah dengan perubahan format penulisan yang membuat PL atau APL harus melakukan pengeditan ulang.
5. Sebagian besar perisalah dan asisten perisalah legislatif (60%) menggunakan template transkrip combo box untuk membantu permasalahan-permasalahan tersebut diatas (yang sudah diberikan template per AKD) dan sisanya (40%) masih dengan cara mengedit ulang untuk perbaikan kata-kata yang kurang dalam transkrip.
6. Secara keseluruhan, responden APL dan PL mengatakan perlu adanya keseragaman format penulisan transkrip.
7. Secara keseluruhan, responden APL dan PL mengatakan pengalaman menggunakan template transkrip combo box adalah sangat memudahkan dalam penggerjaan transkrip.
8. Respon dan saran dari responden adalah membantu dalam penyusunan transkrip untuk segeradpt diolah menjadi risalah dan menyarankan adanya demo secara menyeluruh kepada seluruh APL dan PL.

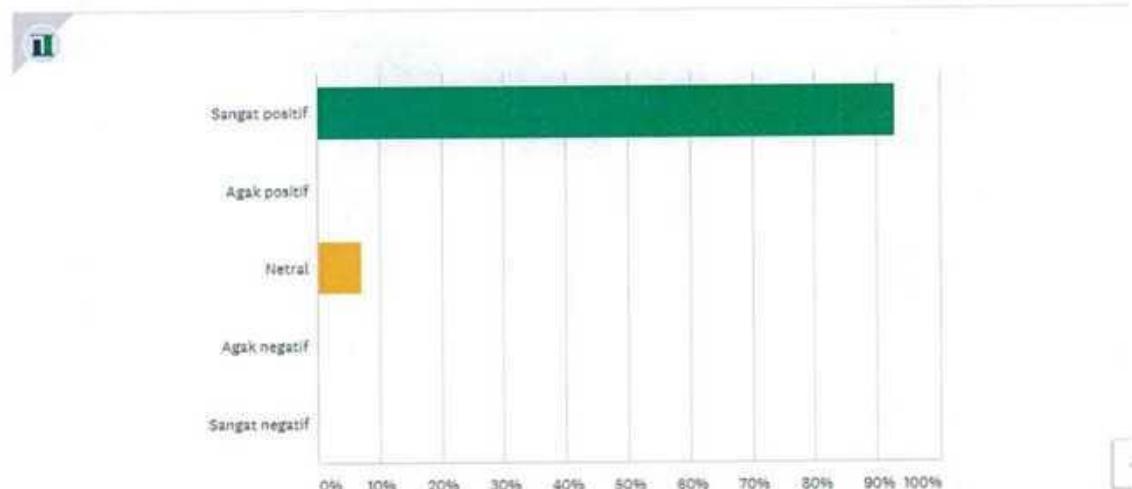
HASIL KUESIONER SOSIALISASI

PELAKSANAAN AKTUALISASI

BAGIAN RISALAH

Apakah reaksi pertama Anda terhadap template transkrip combo box ini?

Answered: 14 Skipped: 0

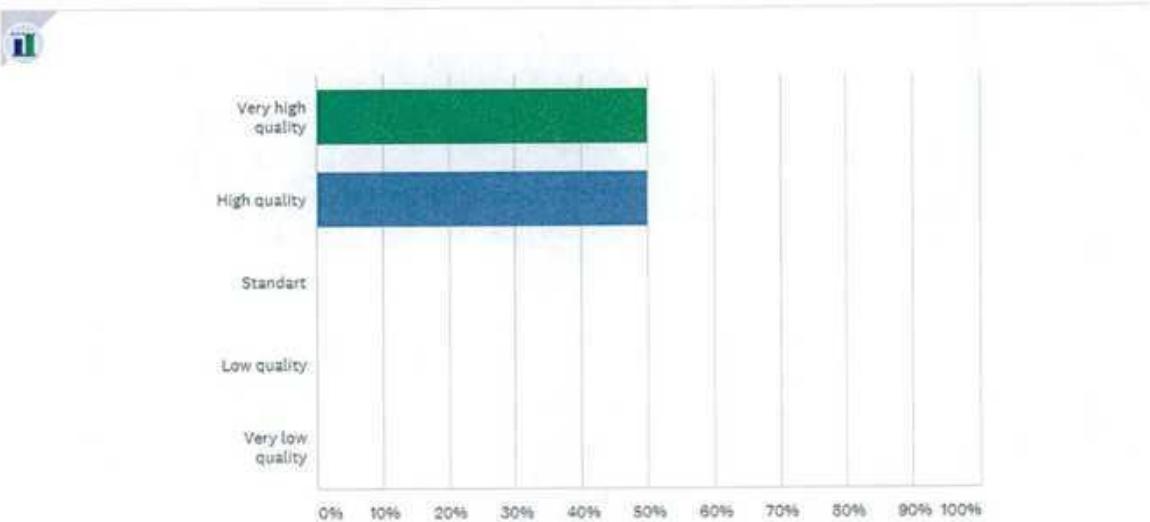


Q2

Show Benchmark
Customize
Sav

Berapa rating yang akan Anda berikan terkait dengan kualitas template transkrip combo box?

Answered: 14 Skipped: 0



ANSWER CHOICES	RESPONSES
Very high quality	50.00%
High quality	50.00%
Standart	0.00%
Low quality	0.00%
Very low quality	0.00%
TOTAL	14

Q3



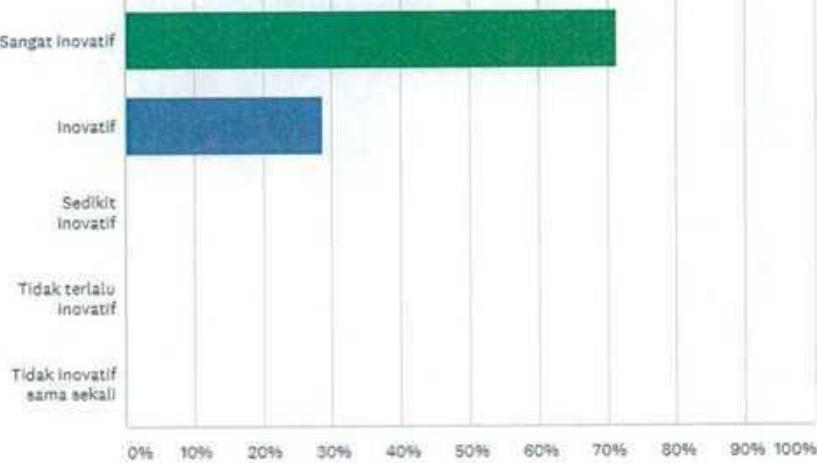
Show Benchmark

Customize

Seberapa inovatif template transkrip ini?

Answered: 14 Skipped: 0

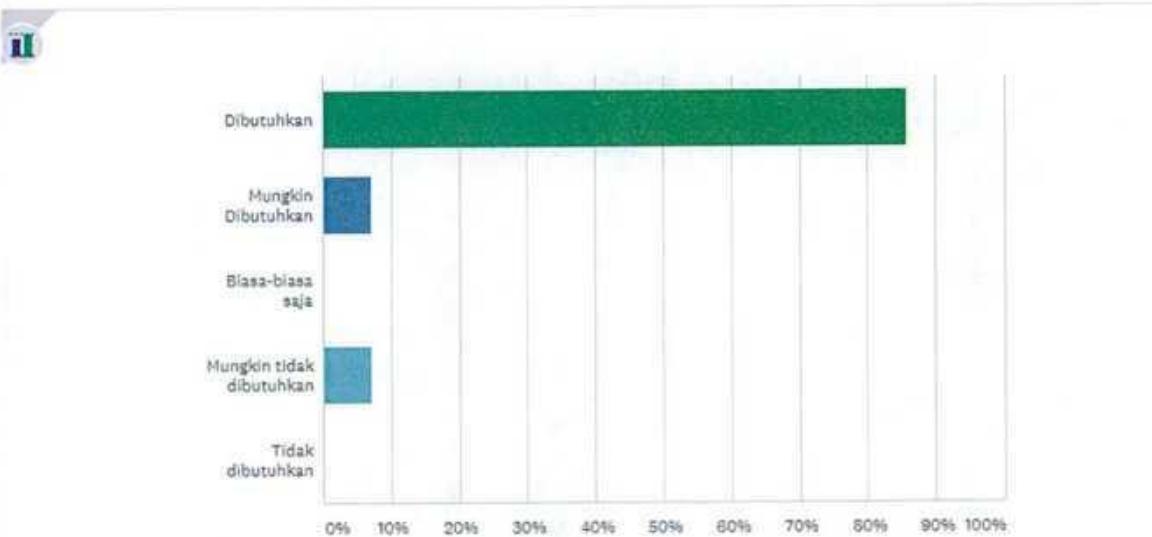
1



ANSWER CHOICES	RESPONSES
▼ Sangat inovatif	71.43%
▼ Inovatif	28.57%
▼ Sedikit inovatif	0.00%
▼ Tidak terlalu inovatif	0.00%
▼ Tidak inovatif sama sekali	0.00%
TOTAL	14

Ketika mengetahui template ini, apakah ini termasuk sesuatu yang Anda butuhkan atau tidak saat penggerjaan/editing transkrip?

Answered: 14 Skipped: 0

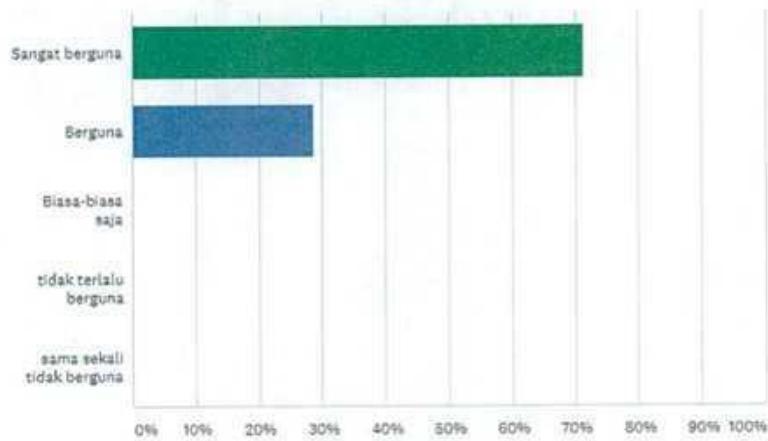


Q5

Customize
Save as ▾

Bagaimana jika template transkrip ini digunakan untuk menggantikan cara anda mengerjakan transkrip sebelumnya?

Answered: 14 Skipped: 0



ANSWER CHOICES	RESPONSES
Sangat berguna	71.43%
Berguna	28.57%
Biasa-biasa saja	0.00%
tidak terlalu berguna	0.00%
sama sekali tidak berguna	0.00%
TOTAL	14

Setelah mengetahui mengenai template transkrip, fasilitas apa yang paling Anda suka/menarik dalam template tersebut?

Answered: 14 Skipped: 0

[RESPONSES \(14\)](#) [WORD CLOUD](#) [TAGS \(0\)](#)

<input type="checkbox"/> Apply to selected <input type="checkbox"/> Filter by tag	<input type="text"/> Search responses 	
Showing 14 responses		
<input type="checkbox"/> Nama anggota 11/6/2019 6:57 PM	View respondent's answers <input type="checkbox"/> Add tags	
<input type="checkbox"/> Box transkrip, nama transkriptor dan pembicara rapat 11/6/2019 10:21 AM	View respondent's answers <input type="checkbox"/> Add tags	
<input type="checkbox"/> Pengaturan margins, spasi dsb dan penamaan nama anggota secara otomatis 11/6/2019 9:58 AM	View respondent's answers <input type="checkbox"/> Add tags	
<input type="checkbox"/> Automatic formating dalam dokumen 11/6/2019 9:56 AM	View respondent's answers <input type="checkbox"/> Add tags	
<input type="checkbox"/> Daftar nama pembicara (anggota dpr) 11/6/2019 9:55 AM	View respondent's answers <input type="checkbox"/> Add tags	
<input type="checkbox"/> Tentunya sangat mempermudah pekerjaan dalam menyusun transkrip atau risalah rapat sementara. Dan juga akan lebih membuat presisi mengenai daftar pembicara serta format dari transkrip tersebut 11/6/2019 9:51 AM	View respondent's answers <input type="checkbox"/> Add tags	
<input type="checkbox"/> Fasilitas nama pembicara 11/6/2019 9:50 AM	View respondent's answers <input type="checkbox"/> Add tags	
<input type="checkbox"/> Mencari nama anggota dewan dengan cara tinggal pilih 11/6/2019 9:48 AM	View respondent's answers <input type="checkbox"/> Add tags	
<input type="checkbox"/> Pencarian nama anggota. Sehingga saya sebagai api tidak perlu mencari di daftar hadir untuk nama lengkap dan gelar. Ini sangat membantu sekali untuk api 11/5/2019 4:49 PM	View respondent's answers <input type="checkbox"/> Add tags	
<input type="checkbox"/> Adanya logo DPR RI otomatis 11/5/2019 4:31 PM	View respondent's answers <input type="checkbox"/> Add tags	

Fasilitas/fitur apa yang ingin anda sarankan pada penulis untuk ditambahkan dalam template transkrip tersebut?

Answered: 13 Skipped: 1

[RESPONSES \(13\)](#) [WORD CLOUD](#) [TAGS \(0\)](#)

[Apply to selected](#) [Filter by tag](#)

[Search responses](#) 

Showing 13 responses

- Nama anggota by fraksi untuk paripurna

11/6/2019 6:57 PM

[View respondent's answers](#) [Add tags](#)

Tidak ada, sudah bagus**

11/6/2019 10:21 AM

[View respondent's answers](#) [Add tags](#)

Sementara ini cukup

11/6/2019 9:58 AM

[View respondent's answers](#) [Add tags](#)

N/A

Mitra kerja

11/6/2019 9:55 AM

[View respondent's answers](#) [Add tags](#)

Sudah lengkap sekali template yang sudah dibuat. Kreatif sekali!

11/6/2019 9:51 AM

[View respondent's answers](#) [Add tags](#)

Fitur nama pl

11/6/2019 9:50 AM

[View respondent's answers](#) [Add tags](#)

Dapat digunakan ke jenjang berikutnya dalam pembuatan risalah resmi

11/6/2019 9:48 AM

[View respondent's answers](#) [Add tags](#)

Sementara ini tidak ada. Hanya disarankan agar penulis membuat template per AKD untuk menghindari pengisian data nama pembicara yang terlalu lama akibat banyaknya pilihan nama yang tersedia.

11/6/2019 9:19 AM

[View respondent's answers](#) [Add tags](#)

Per akd

11/6/2019 8:49 AM

[View respondent's answers](#) [Add tags](#)

Tanggal rapat/tanggal sidang

11/5/2019 5:07 PM

[View respondent's answers](#) [Add tags](#)

Mungkin ditambah lagi untuk mitra mitra nya dibuat seperti ini juga

11/5/2019 4:49 PM

[View respondent's answers](#) [Add tags](#)

Tolong diupdate untuk anggota periode baru ya. Thank you.

11/8/2019 4:31 PM

[View respondent's answers](#)

[Add tags](#)



Kesimpulan :

Sejauh ini setelah melakukan sosialisasi, respon dari *audience* sangat bagus. *Audience* antusias terhadap metode baru untuk mempercepat transkrip ini. Saran-saran dari *audience* meliputi penginputan data dengan metode per AKD juga sudah diterapkan oleh penulis. Dengan adanya tindak lanjut untuk evaluasi diharapkan, asisten perisalah legislatif dan perisalah legislatif dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal demi terciptanya risalah sementara yang segera dapat diolah menjadi risalah resmi.

LAPORAN SINGKAT
RAPAT SOSIALISASI KEGIATAN AKTUALISASI
CPNS BAGIAN RISALAH ANGKATAN IV TAHUN 2019

Jenis Rapat	:	Rapat Koordinasi
Hari / Tanggal	:	Rabu, 6 November 2019
Pukul	:	10.00 WIB – 11.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Kementerian Keuangan
Acara	:	Sosialisasi Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Angkatan IV Tahun 2019
Ketua Rapat	:	Kepala Bagian Risalah
Hadir	:	Kepala Bagian Risalah, Pejabat Fungsional Perisalah, Pejabat Fungsional Asisten Perisalah, dan CPNS Bagian Risalah

PENDAHULUAN:

1. Rapat dibuka pada pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat setelah sebagian undangan sudah hadir di dalam ruangan.
2. Ketua Rapat menerangkan bahwa agenda rapat pada hari ini adalah untuk mempresentasikan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh CPNS di bagian Risalah yang saat ini memasuki waktu off campus dan sedang aktualisasi di unit kerja selama 30 hari
3. Ketua Rapat mempersilakan CPNS untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya mengenai sosialisasi kegiatan aktualisasi
4. Ketua Rapat mempersilakan Mentor, dan Undangan untuk memberikan perlanyaan dan tanggapan.

KESIMPULAN RAPAT:

1. Sosialisasi dilakukan agar hasil aktualisasi CPNS bagian risalah dapat diketahui, dikoreksi, dan atau diterapkan bagi pegawai bagian risalah

2. Sosialisasi dilakukan oleh 10 orang CPNS APLT Bagian Risalah
3. Masing masing CPNS melakukan sosialisasi sesuai dengan hasil aktualisasi sebagai berikut:
 - a. Aga Sukma D.: Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat
 - b. Riri Aulia Yonni: Penyusunan Format Urutan dan Nama Pembicara Rapat Pada Label Kaset
 - c. Michel Ike Permatasari: Penyusunan Transkrip dengan Menggunakan Template Combo Box
 - d. Shofia Anjani Swid: Draf Pedoman Kegiatan Kodefikasi dan Pemberian Label Kaset pada Komisi VI
 - e. Shafa Aulia Suraji: Draf Pedoman Penetapan Waktu Kerja Pengerjaan Transkrip
 - f. Farini Maydiatri C.P: Penyusunan Draf Pedoman Pengumpulan Bahan-Bahan Rapat untuk Menunjang Hasil Transkrip Rapat.
 - g. Tresamaida Simatupang: Pemanfaatan Cloud DPR RI Sebagai Tempat Penyimpanan Risalah
 - h. Fitri Febriyamin: Penyusunan Draf Pedoman Perekaman Rapat
 - i. Azwina Zahra A.: Penyusunan Format Laporan Hasil Transkrip Menggunakan Ms. Excel melalui Data Validation dan Hyperlink
 - j. Nita Setya Efriyani: Pembuatan Format Berita Acara Penyerahan Transkrip
4. Beberapa saran dan masukan yang menjadi perhatian untuk penulisan laporan sebaiknya dapat pula diterapkan untuk perisalah legislatif bukan hanya untuk asisten perisalah legislatif, mengoreksi durasi kaset atau rekaman dalam melaksanakan transkrip yang sebaiknya ditulis dalam merekam digunakan satu muka kaset dan durasi maksimal 25 menit.
5. Brochure/leaflet atau lembaran yang dibagikan oleh masing-masing CPNS, kreatif dan beragam, hal ini sangat diapresiasi oleh peserta sosialisasi terutama senior.
6. Mencantumkan data pendukung bahan-bahan rapat pada draf pedoman pengumpulan bahan-bahan rapat

7. Hasil Aktualisasi agar dapat diterapkan di bagian risalah dan Alat Kelengkapan Dewan dan dapat menunjang pekerjaan dengan baik.

PENUTUP:

Kegiatan sosialisasi ditutup pukul 11.30 WIB

Menyetujui

Mentor,



Dra. Tri Budi Utami, M.Si
NIP. 198008102003122004

Peserta Latsar



Michel Ike Permatasari, A.Md. Sek.
NIP . 199511272019032002